



RENCANA KERJA

PERANGKAT DAERAH (RENJA PD) PROVINSI RIAU



2026

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK PROVINSI RIAU**



Kunjungi Laman Kami
www.kesbangpol.riau.go.id

“Riau Rumah Rumpun Melayu,
Merawat Tuah Menjaga Marwah,
Takkan Melayu Hilang di Bumi”



SALINAN

GUBERNUR RIAU

**PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 38 TAHUN 2025**

TENTANG

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR RIAU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, menyebutkan bahwa rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2026;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);

10. Peraturan Gubernur Riau Nomor 36 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2026.

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2026 dan dokumen lainnya yang mempunyai kedudukan yang strategis untuk menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN**
- BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024**
- BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**
- BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**
- BAB V : PENUTUP**

Pasal 3

Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 28 November 2025

Plt. GUBERNUR RIAU,

TTD

S. F. HARIYANTO

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 28 November 2025
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

TTD

SYAHRIAL ABDI

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2025 NOMOR : 39

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

YANUHARMADI, SH, MH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19840326 200903 1 003

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I PENDAHULUAN.	1
1.1. Latar Belakang.	1
1.2. Dasar Hukum.	4
1.3. Maksud dan Tujuan.	9
1.4. Sistematika Penulisan.	9
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	14
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	14
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	23
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	42
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	47
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	57
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	60
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	60
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	64
3.3. Program dan Kegiatan	65
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	75
BAB V PENUTUP	89

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Provinsi Riau	16
Tabel 2.2.1	Indeks Ketahanan Nasional (IKN) Provinsi Riau Tahun 2019-2024	26
Tabel 2.2.2a	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Riau Tahun 2017 – 2020	27
Tabel 2.2.2b	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Riau Tahun 2021 – 2024	28
Tabel 2.2.3	Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Riau Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019-2024	31
Tabel 2.2.4	Distribusi Perolehan Kursi DPRD Provinsi Periode 2019 – 2024	32
Tabel 2.2.5	Persentase Keterwakilam Perempuan Pada Kursi DPRD Provinsi Dan Kab/Kota Di Provinsi Riau 5 (Lima) Tahun Terakhir (2020 s.d 2024)	32
Tabel 2.2.6	Rekapitulasi Jumlah Pemilih Disabilitas untuk Pemilu 2024	34
Tabel 2.2.7	Jumlah Ormas/LSM, Yayasan yang Terdaftar pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau Tahun 2017–2024	35
Tabel 2.2.8	Jumlah Ormas/LSM/Yayasan Bidang Disabilitas Yang Terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Riau	35
Tabel 2.2.9	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Provinsi Riau Tahun 2020-2024	37

		Halaman
Tabel 2.2.10	Angka Kriminalitas Tahun 2020-2024 di Provinsi Riau	38
Tabel 2.2.11	Data Jumlah Konflik di Provinsi Riau (Tahun 2020 s/d 2024)	39
Tabel 2.2.12	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau	40
Tabel 2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi Riau	49
Tabel 2.5	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Provinsi Riau	59
Tabel 3.3	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Provinsi Riau	66
Tabel 4.1	Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau Tahun 2026	76

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja Perangkat Daerah ini juga merupakan sebuah dokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya. Secara hierarki penyusunan rencana kerja OPD merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Karenanya, sebagai dokumen perencanaan daerah, Renja OPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

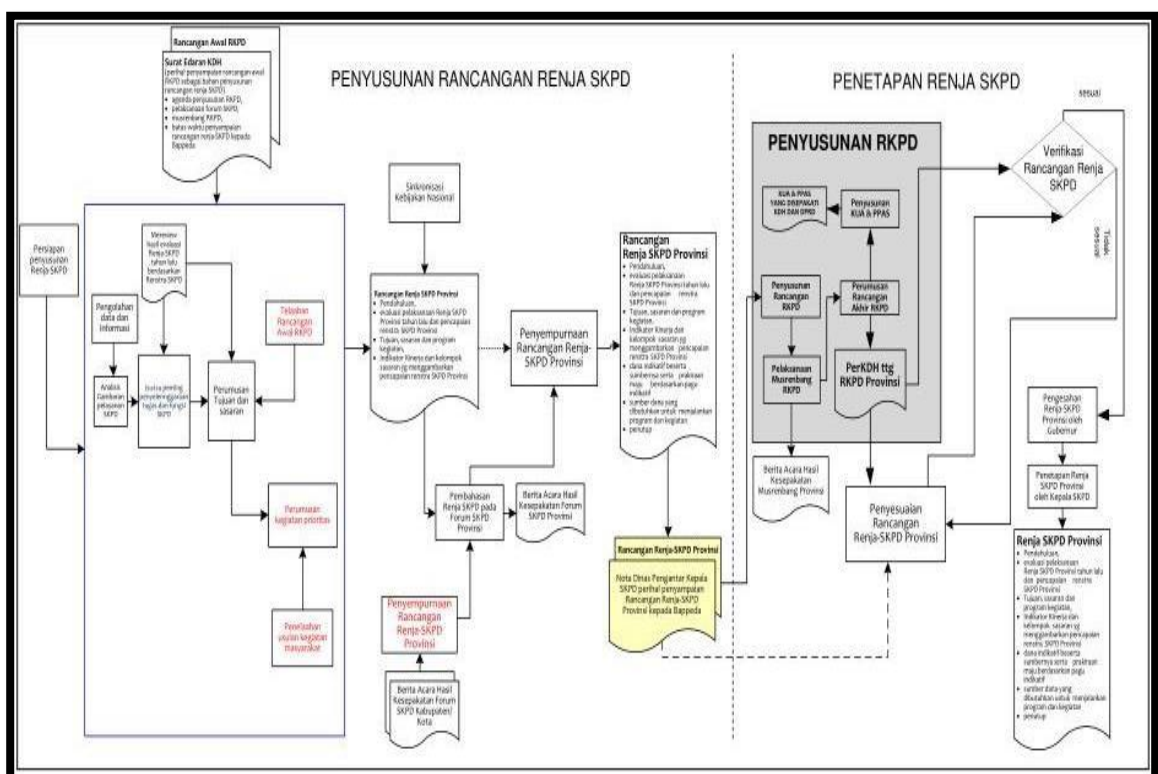
Tahapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah;
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah

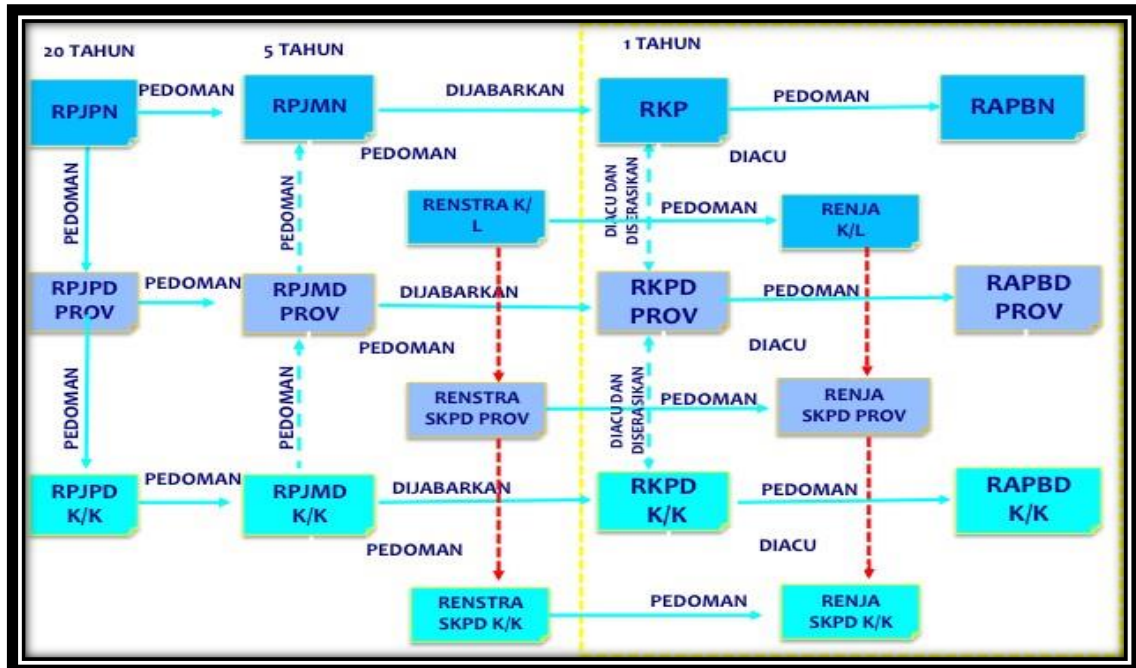
berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan;

3. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dan Rancangan Awal RKPD;
4. Pembahasan Rancangan Renja Perangkat Daerah dalam forum Perangkat Daerah/lintas perangkat daerah untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran;
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD;
6. Verifikasi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan.

Bagan tahapan tata cara penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :



Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kab/Kota dengan Renja Perangkat Daerah



Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Riau Tahun 2025-2026 merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan Nasional dan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Riau. Penyusunan RPD Provinsi Riau Tahun 2025-2026 disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Tahun 2024. Agar RPD Provinsi Riau Tahun 2025-2026 selaras dengan kebijakan pembangunan nasional, perlu dilakukan telaah terhadap pembangunan nasional yang berhubungan atau mempengaruhi pembangunan daerah. Telaah itu dilakukan dengan tujuan untuk mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan dan harus selaras dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang, dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

1.2 DASAR HUKUM

Landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau Tahun 2026 adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nemer 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemer 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nemer 72 Tahun 2019 tentang Perubahan alas Peraturan Pemerintah Nemer 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
12. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan gender;
13. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 dan Nomor 09 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam memelihara kerukunan umat beragama Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat beragama dan Pembangunan Rumah Ibadah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 455);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 430);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 yang mengatur tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1051);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Republik Indonesia 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisi Pemutakhiran Klasifikasi,

Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Tahun 2024;
25. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor : 5);
26. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor : 14);
27. Peraturan Gubernur Riau Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pedoman Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 Nomor 2);
28. Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 Nomor 53);
29. Peraturan Gubernur Riau Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 3);
30. Peraturan Gubernur Riau Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 4);

31. Peraturan Gubernur Riau Nomor 38 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 Nomor 38).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau adalah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RKP Provinsi Riau di tahun 2026 melalui perencanaan kinerja tahunan.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau adalah :

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau tahun 2025-2026;
2. Sebagai instrument akuntabilitas kinerja di tahun 2026 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan laporan kinerja.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Renja Perangkat Daerah ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan memuat latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

Substansi bab sebagai berikut :

- 1.1 Latar Belakang mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan

Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD;

- 1.2 Dasar Hukum memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK), kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah;
- 1.3 Maksud dan Tujuan memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah;
- 1.4 Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan capaian renstra perangkat daerah, analisa kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat. Subtansi bab sebagai berikut :

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah menguraikan realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang

direncanakan, realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, dan tabel T- C.29;

- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah menguraikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK dan lampiran table T-C.30;
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah menguraikan tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD, Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*), Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD; dan Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan;
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD menguraikan Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis

kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda, lampiran tabel T-C.31;

- 2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat menguraikan Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh, penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, lampiran tabel T-C.32.

Bab III Tujuan dan sasaran perangkat daerah memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja perangkat daerah, program dan kegiatan.

Subtansi bab sebagai berikut :

- 3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional menguraikan tentang penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah menguraikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah;
- 3.3 Program dan Kegiatan menguraikan faktor- faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan

program dan kegiatan, Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya, lampiran tabel T-C.33.

Bab IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau merupakan pelaksanaan tahun keempat dari perencanaan lima tahunan atau Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau Tahun 2019-2024. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD.

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau pada Tahun 2023 memuat 6 (enam) Program, 10 (sepuluh) Kegiatan dan 25 (dua puluh lima) Sub Kegiatan dengan Total alokasi anggaran belanja APBD Perubahan sebesar Rp. 111.913.243.298,-. Setelah melalui beberapa tahapan proses perencanaan dan penganggaran, berdasarkan Realisasi Fisik dan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau anggaran yang terealisasi pada Tahun 2023 sebesar Rp. 110.709.655.434,- atau 98,92%.

Adapun Matriks Rekapitulasi Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan capaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau, dapat dilihat pada tabel 2.1 :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Provinsi Riau

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program / kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM									
8.01.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
0.00.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100.00	100 Persen		
0.00.01.1.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang dipenuhi	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100.00	1 Laporan		
0.00.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	281 Orang	70 Orang	70 Orang	70 Orang	100.00	70 Orang	210	74.73
0.00.01.1.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian yang difasilitasi	0 Paket							
0.00.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket							
0.00.01.1.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	26 Jenis layanan	5 Jenis layanan	8 Jenis layanan	8 Jenis layanan	100.00	8 Jenis layanan		
0.00.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100.00	1 Paket	3	75.00
0.00.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	26 Paket	9 Paket	5 Paket	5 Paket	100.00	7 Paket	21	80.77
0.00.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	100.00	2 Paket	8	72.73
0.00.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100.00	1 Paket	5	71.43
0.00.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100.00	1 Dokumen	3	100.00
0.00.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		3 Paket	3 Paket	100.00	1 Paket	4	100.00
0.00.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	410 Laporan	211 Laporan	158 Laporan	158 Laporan	100.00	225 Laporan	594	144.88
0.00.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0.00		0	0.00
0.00.01.1.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	7 Jenis Barang	1 Jenis Barang	2 Jenis Barang	2 Jenis Barang	100.00	2 Jenis Barang		
0.00.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Paket		7 Paket	0 Paket	0.00	5 Paket	5	41.67
0.00.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	50 Unit	22 Unit	12 Unit	12 Unit	100.00	15 Unit	49	98.00
0.00.01.1.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	14 Jenis	3 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	100.00	4 Jenis		
0.00.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2770 Laporan	220 Laporan	500 Laporan	500 Laporan	100.00		720	25.99
0.00.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100.00	1 Laporan	3	75.00
0.00.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.00	1 Laporan	2	100.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program / kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
0.00.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	44 Laporan	12 Laporan	11 Laporan	11 Laporan	100.00	11 Laporan	34	77.27
0.00.01.1.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	14 Jenis	3 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	100.00	4 Jenis		
0.00.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	24 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	100.00	6 Unit	18	75.00
0.00.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	56 Unit	19 Unit	15 Unit	15 Unit	100.00	14 Unit	48	85.71
0.00.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit		4 Unit	4 Unit	100.00	2 Unit	6	120.00
0.00.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	43 Unit	55 Unit	1 Unit	1 Unit	100.00	1 Unit	57	132.56
8.01.02.	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi	3.17 Nilai		3.15 Nilai	2.93 Nilai	93.02	3.17 Nilai		
8.01.02.1.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase pemantapan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100.00	100 Persen		
8 01 02 1.01 01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	2 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.00	1 Dokumen	2	100.00
8 01 02 1.01 02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	2 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.00	1 Dokumen	2	100.00
8 01 02 1.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	500 Orang		1350 Orang	1350 Orang	100.00	320 Orang	1670	334.00
8.01.02.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	370 Orang	350 Orang	100 Orang	100 Orang	100.00	100 Orang	550	148.65
8.01.02.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100.00	1 Laporan	3	100.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program / kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8.01.02.1.01.06	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	2 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.00	1 Dokumen	2	100.00
8.01.03.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Politik	3.28 Nilai		3.26 Nilai	3.24 Nilai	99.39	3.28 Nilai		
		Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu	75.50 Persen	69.54 Persen	69.54 Persen	69.54 Persen	100.00	75.50 Persen		
8.01.03.1.01.1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Pemantapan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi dan Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100.00	100 Persen		
8 01 03 1.01 01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	2 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.00	1 Dokumen	2	100.00
8 01 03 1.01 02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	2 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.00	1 Dokumen	2	100.00
8.01.03.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	875 Orang	475 Orang	480 Orang	480 Orang	100.00	400 Orang	1355	154.86
8.01.03.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	630 Orang	150 Orang	300 Orang	300 Orang	100.00	300 Orang	750	119.05
8.01.02.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.00	1 Laporan	2	100.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program / kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8.01.04.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas yang Berfungsi sesuai Regulasi	75.10 Persen	75.00 Persen	75.05 Persen	75.05 Persen	100.00	75.10 Persen		
8.01.04.1.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Pemantapan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100.00	100 Persen		
8 01 04 1.01 01	Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	2 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.00	1 Dokumen	2	100.00
8 01 04 1.01 02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	2 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.00	1 Dokumen	2	100.00
8.01.04.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	300 Orang	152 Orang	100 Orang	100 Orang	100.00	160 Orang	412	137.33
8 01 04 1.01 04	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100 Orang		318 Orang	318 Orang	100.00	50 Orang	368	368.00
8.01.04.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100.00	1 Laporan	3	100.00
8.01.05.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi	3.14 Nilai		3,12 Nilai	3,18 Nilai	#VALUE!	3.14 Nilai		
		Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya	2.96 Nilai		2,94 Nilai	2,98 Nilai	#VALUE!	2.96 Nilai		
8.01.05.1.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Pemantapan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100.00	100 Persen		
8 01 05 1.01 01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	2 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.00	1 Dokumen	2	100.00
8.01.05.1.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00	1 Dokumen	3	100.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program / kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8 01 05 1.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	200 Orang		800 Orang	800 Orang	100.00	2500 Orang	3300	1650.00
8.01.05.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	200 Orang	2949 Orang	225 Orang	225 Orang	100.00	50 Orang	3224	1612.00
8.01.05.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100.00	1 Laporan	3	100.00
8.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	75.10 Persen	75.00 Persen	75.05 Persen	75.05 Persen	100.00	75.10 Persen		
8.01.06.1.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100.00	100 Persen		
8 01 06 1.01 01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	2 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.00	1 Dokumen	2	100.00
8 01 06 1.01 02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	2 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.00	1 Dokumen	2	100.00
8 01 06 1.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	600 Orang		1090 Orang	1090 Orang	100.00	270 Orang	1360	226.67

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program / kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8.01.06.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	875 Orang	515 Orang	171 Orang	171 Orang	100.00	200 Orang	886	101.26
8.01.06.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	14 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100.00	2 Laporan	5	35.71
8.01.06.1.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00	1 Dokumen	3	100.00

Sesuai Tabel 2.1 realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan dengan indikator Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi dari 3,15 yang direncanakan turun menjadi 2,93 dan Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik dengan indikator Indeks Ketahanan Nasional Gatra Politik dari 3,26 turun menjadi 3,24.

Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Sementara realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya dengan indikator Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi dari target yang direncanakan 3,12 naik menjadi 3,18 dan indikator Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya 2,94 naik menjadi 2,98.

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan dikarenakan lebih dari faktor eksternal sebab pengukuran ketahanan nasional menjadi tupoksinya Lemhannas RI sementara daerah hanya mensupport data yang diminta.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah umumnya meliputi ketidak tercapaian sasaran kegiatan (sebagian atau seluruhnya), penyesuaian target

kinerja tahunan, serta potensi evaluasi ulang pada target lima tahunan.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah pengoptimalisasian anggaran pada program/kegiatan prioritas, peningkatan kualitas perencanaan (RKPD dan Renja PD), penguatan pengawasan dan akuntabilitas serta peningkatan kapasitas SDM pengelola anggaran.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Analisis kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau dilakukan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Pencapaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau tahun 2026 dengan penjelasan sebagai berikut :

No.	Bidang	Ruang Lingkup
1.	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	Ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala Kabupaten/Kota.
2.	Bidang Politik Dalam Negeri	Sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala Kabupaten/Kota.
3.	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan	Ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala Kabupaten/Kota.

No.	Bidang	Ruang Lingkup
4.	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala Kabupaten/Kota.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau adalah Perangkat Daerah yang membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintah daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik serta tugas-tugas dekonsentrasi yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat. Dalam pengembangan pendidikan politik masyarakat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau telah melaksanakan program dan kegiatan-kegiatan yang mendorong peningkatan pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan politik. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau menyadari betapa pentingnya pendidikan politik bagi masyarakat karena pendidikan politik adalah suatu sarana untuk meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Pendidikan politik merupakan salah satu alternatif proses demokratisasi dinegara kita untuk menyadarkan bahwa demokrasi merupakan salah satu alat atau sarana efektif dan efisien bagi perwujudan kesejahteraan disetiap aspek kehidupan masyarakat dan desa.

Dari aspek penguatan integrasi nasional, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau telah melaksanakan program dan kegiatan yang terkait aspek penguatan integrasi nasional mencakup : penguatan Ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, pendidikan politik dan peningkatan demokrasi, ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan, kewaspadaan nasional dan penanganan konflik.

Kondisi Ketahanan Nasional di Provinsi Riau dari berbagai gatra pembangunan dapat dilihat dari Indeks Ketahanan Nasional untuk mengukur ketahanan daerah, yang didalamnya terdapat 8 gatra, 37 aspek, 108 variable dan 821 indikator dari berbagai aspek pembangunan. Data Indeks Ketahanan Nasional Provinsi Riau Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2.1
Indeks Ketahanan Nasional (IKN)
Provinsi Riau Tahun 2019-2024

No	Gatra	Tahun											
		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
		Skor	Status Kondisi	Skor	Status Kondisi	Skor	Status Kondisi	Skor	Status Kondisi	Skor	Status Kondisi	Skor	Status Kondisi
1	Geografi	3,19	Cukup Tangguh	3,15	Cukup Tangguh	3,48	Tangguh	3,35	Cukup Tangguh	3,35	Cukup Tangguh	3,35	Cukup Tangguh
2	Demografi	2,98	Cukup Tangguh	2,82	Cukup Tangguh	3,54	Tangguh	3,03	Cukup Tangguh	3,06	Cukup Tangguh	3,05	Cukup Tangguh
3	Sumber Kekayaan Alam	2,29	Kurang Tangguh	2,37	Kurang Tangguh	1,44	Rawan	2,36	Kurang Tangguh	2,35	Kurang Tangguh	2,30	Kurang Tangguh
4	Ideologi	2,89	Cukup Tangguh	3,09	Cukup Tangguh	2,21	Kurang Tangguh	2,93	Cukup Tangguh	3,00	Cukup Tangguh	3,06	Cukup Tangguh
5	Politik	3,22	Cukup Tangguh	3,20	Cukup Tangguh	1,54	Rawan	3,24	Cukup Tangguh	3,29	Cukup Tangguh	3,31	Cukup Tangguh
6	Ekonomi	2,98	Cukup Tangguh	3,06	Cukup Tangguh	2,67	Cukup Tangguh	3,11	Cukup Tangguh	3,16	Cukup Tangguh	3,13	Cukup Tangguh
7	Sosial dan Budaya	2,59	Kurang Tangguh	2,88	Cukup Tangguh	2,18	Kurang Tangguh	2,86	Cukup Tangguh	2,93	Cukup Tangguh	2,94	Cukup Tangguh
8	Pertahanan & Keamanan	3,15	Cukup Tangguh	3,36	Cukup Tangguh	1,78	Rawan	3,36	Cukup Tangguh	3,36	Cukup Tangguh	3,09	Cukup Tangguh
Skor IKN		2,92	Cukup Tangguh	3,03	Cukup Tangguh	2,26	Kurang Tangguh	3,05	Cukup Tangguh	3,08	Cukup Tangguh	3,05	Cukup Tangguh

Sumber : Labkurtannas Lemhannas RI

Sementara itu kondisi demokrasi di Riau dapat dilihat dari Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang diukur melalui 3 aspek, yaitu kebebasan sipil (civil liberty), hak-hak politik (political rights), dan lembaga demokrasi (democratic institution), terdiri dari 11 variabel dan 28 indikator. Pencapaian skor IDI Provinsi Riau selama kurun waktu tahun 2017-2020 mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat dari 73,41 menjadi 76,86. Sedangkan untuk tahun 2021 mengalami perubahan Aspek dan Variabel, Aspek tersebut adalah :

1. Aspek Kebebasan;
2. Aspek Kesenjangan;
3. Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi.

Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 2.2.2a
Indeks Demokrasi Indonesia
Provinsi Riau Tahun 2017 - 2020

No	Aspek / Variabel	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
I.	Kebebasan Sipil	82,03	86,88	85,15	86,08
1.	Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	79,16	97,66	100,00	97,66
2.	Kebebasan Berpendapat	65,97	83,30	60,41	55,53
3.	Kebebasan Berkeyakinan	84,28	83,20	83,55	90,77
4.	Kebebasan dari Diskriminasi	90,74	93,47	93,47	82,47
II.	Hak-Hak Politik	66,57	62,77	61,68	65,40
1.	Hak Memilih dan Dipilih	75,55	75,53	70,65	71,56
2.	Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan	56,16	50,00	52,72	59,24
III.	Lembaga Demokrasi	73,41	89,47	84,19	83,48
1.	Pemilu yang Bebas dan Adil	95,48	91,14	78,77	78,77
2.	Peran DPRD	59,78	87,36	73,55	68,54
3.	Peran Partai Politik	71,64	100,00	100,00	99,93
4.	Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	56,26	70,50	67,53	68,73
5.	Peran Peradilan yang Independen	86,31	100,00	100,00	100,00
Skor IDI		73,41	77,59	75,21	76,86

Sumber : BPS Provinsi Riau

Tabel 2.2.2b
Indeks Demokrasi Indonesia
Provinsi Riau Tahun 2021 - 2024

Deskripsi		Tahun							
		2021		2022		2023		2024	
		Capaian	Kategori	Capaian	Kategori	Capaian	Kategori	Capaian	Kategori
IDI Komposit		75,66	SEDANG	73,64	SEDANG	75,55	SEDANG	77,06	SEDANG
Aspek 1	Kebebasan	88,40	TINGGI	84,46	TINGGI	79,39	SEDANG	82,71	TINGGI
1	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat oleh aparat negara	95,53	-	95,59	-	95,67		100	
2	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat antar masyarakat	100	-	88,98	-	89,19		89,38	
3	Terjaminnya kebebasan berkeyakinan	100	-	77,97	-	63,95		85,84	
4	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan	76,92	-	76,92	-	76,92		76,92	
5	Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu	91,76	-	91,76	-	91,76		82,13	
6	Pemenuhan hak-hak pekerja	74,77	-	79,03	-	64,83		62,5	
7	Pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya	76,42	-	82,01	-	74,79		76,63	

Deskripsi		Tahun							
		2021		2022		2023		2024	
		Capaian	Kategori	Capaian	Kategori	Capaian	Kategori	Capaian	Kategori
Aspek 2	Kesetaraan	75,88	SEDANG	70,53	SEDANG	80.13	TINGGI	74,82	SEDANG
8	Kesetaraan Gender	93,09	-	93,84	-	95.33		85,35	
9	Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan	100	-	46,15	-	100.00		46,15	
10	Anti monopoli sumber daya ekonomi	59,33	-	60,83	-	63.17		65,33	
11	Akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial	54,70	-	56,24	-	65.34		71,67	
12	Kesetaraan Kesempatan Kerja Antar Wilayah	95,58	-	95,63	-	95.77		96,3	
13	Akses masyarakat terhadap informasi publik	75,22	-	79,59	-	84.87		88,37	
14	Kesetaraan dalam pelayanan dasar	72,92	-	72,80	-	72.64		74,25	
Aspek 3	Kapasitas Lembaga Demokrasi	62,83	SEDANG	66,69	SEDANG	66.30	SEDANG	74,17	SEDANG
15	Kinerja Lembaga Legislatif	14,29	-	33,33	-	31.82		66,67	
16	Kinerja Lembaga Yudikatif	88,90	-	85,04	-	87.55		85,5	
17	Netralitas Penyelenggara Pemilu	30,77	-	30,77	-	30.77		80,77	
18	Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah	0,00	-	23,08	-	7.69		23,08	
19	Jaminan pemerintah/pemerintah	70,72	-	72,10	-	70.42		70,77	

Deskripsi		Tahun							
		2021		2022		2023		2024	
		Capaian	Kategori	Capaian	Kategori	Capaian	Kategori	Capaian	Kategori
	daerah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat								
20	Transparansi Anggaran dalam Bentuk Penyediaan Informasi APBN/D oleh Pemerintah	100	-	100	-	100.00		100	
21	Kinerja Birokrasi dalam pelayanan publik	73,60	-	74,20	-	80.80		82,4	
22	Pendidikan Politik pada kader partai politik	100	-	100	-	100.00		62	

Sumber : BPS Provinsi Riau

Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Riau Dalam Pemilihan Umum (Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Legislatif DPR RI, DPD, DPRD Provinsi Riau, DPRD Kab/Kota) tahun 2024 bila dibandingkan tahun 2019, Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Riau mengalami penurunan. Tahun 2019 Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (84,68), Pemilihan Legislatif DPR RI (84,17), DPD RI (84,38), DPRD Provinsi Riau (84,43) sementara pada tahun 2024 partisipasi masyarakat dalam pemilu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (77,62), Pemilihan Legislatif DPR RI (77,40), DPD RI (77,44), DPRD Provinsi Riau (77,35) selanjutnya pemilihan kepala daerah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau juga mengalami penurunan jika tahun 2020 realisasinya sebesar 69,54 dan tahun 2024 dari target sebesar 77,5 dan realisasi 60,98.

Sedangkan Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur dari target sebesar 77,5 dan realisasi hanya mencapai 59,43.

Tabel 2.2.3
Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Riau Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019-2024

No	Pemilihan Umum	Tahun (Persentase Rata-rata)											
		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Pilkada Kabupaten / Kota	77,5	-	77,5	69,54	77,5	69,54	77,5	69,54	77,5	69,54	77,5	60,98
2	Pilgub dan Wagub		-		-		-		-			77,5	59,43
3	Pileg DPR RI		84,17		-		-		-			77,5	77,40
4	Pileg DPRD Provinsi		84,43		-		-		-			77,5	77,35
5	Pileg DPD RI		84,38		-		-		-			77,5	77,44
6	Pilpres dan Wapres		84,68		-		-		-			77,5	77,62

Sumber : KPU Provinsi Riau

Jumlah Distribusi Perolehan Kursi DPRD Provinsi setiap tahunnya sejumlah 65 kursi dimana terdapat 9 partai politik antara lain partai kebangkitan bangsa sejumlah 6 kursi, partai Gerakan Indonesia raya sebesar 8 kursi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebesar 11 kursi, Partai Golongan Karya 10 kursi, Partai Nasional Demokrat sebesar 6 kursi, Partai Keadilan Sejahtera sebesar 10 kursi, Partai Persatuan Pembangunan sebesar 1 kursi, Partai Amanat Nasional 5 kursi dan Partai Demokrat sebesar 8 kursi. Distribusi perolehan kursi DPRD Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel di bawah :

Tabel 2.2.4
Distribusi Perolehan Kursi DPRD Provinsi Periode 2019 – 2024

NO	PARTAI POLITIK	JUMLAH KURSI DPRD RIAU	TAHUN DAN JENIS KELAMIN											
			2019		2020		2021		2022		2023		2024	
			L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Partai Kebangkitan Bangsa	6	6	0	6	0	6	0	6	0	6	0	4	2
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	8	6	2	6	2	6	2	6	2	6	2	8	0
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	10	9	1	9	1	8	2	8	2	8	2	9	2
4	Partai Golongan Karya	11	6	5	6	5	6	5	6	5	6	5	6	4
5	Partai Nasional Demokrat	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	1
6	Partai Keadilan Sejahtera	7	5	2	5	2	5	2	5	2	5	2	10	0
7	Partai Persatuan Pembangunan	4	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	1	0
8	Partai Amanat Nasional	7	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	5	0
9	Partai Hati Nurani Rakyat	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0
10	Partai Demokrat	9	8	1	8	1	8	1	8	1	8	1	6	2
JUMLAH		65	52	13	52	13	51	14	51	14	51	14	54	11

Sumber : Sekretariat Dewan Riau

Tabel 2.2.5
Persentase Keterwakilam Perempuan Pada Kursi DPRD Provinsi Dan Kab/Kota Di Provinsi Riau 5 (Lima) Tahun Terakhir (2020 s.d 2024)

NO URUT	PROVINSI/KAB/ KOTA	JUMLAH KURSI	TAHUN				
			2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)
1	PROVINSI RIAU	65	18,46	21,54	21,54	23,08	16,92
2	KAMPAR	45	8,89	8,89	8,89	8,89	0,07
3	BENGKALIS	45	8,89	8,89	8,89	8,89	0,17
4	INDRAGIRI HILIR	45	13,33	13,33	13,33	13,33	0,13
5	INDRAGIRI HULU	40	2,50	2,50	2,50	5,00	0,08
6	ROKAN HILIR	45	17,78	17,78	17,78	15,56	0,09

NO URUT	PROVINSI/KAB/KOTA	JUMLAH KURSI	TAHUN				
			2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)
7	ROKAN HULU	45	4,44	4,44	4,55	4,44	0,11
8	PELALAWAN	35	0,01	2,86	2,86	5,71	0,05
9	SIAK	40	2,50	2,50	2,50	2,50	0,05
10	KUANTAN SINGINGI	35	2,86	2,94	2,94	5,88	0,06
11	KEPULAUAN MERANTI	30	13,33	13,33	13,33	13,33	0,27
12	PEKANBARU	50	17,78	20,00	20,00	20,00	0,16
13	DUMAI	35	6,67	6,90	6,67	6,67	0,03

Sumber : Sekretariat Dewan Riau

Dilihat dari Tabel 2.2.5 sesuai regulasi yang telah ditetapkan, bahwa keterwakilan perempuan adalah 30 persen dari jumlah kursi DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, tapi lihat dari tabel diatas, secara umum baik DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dari 5 (lima) tahun terakhir belum ada yang mencapai 30 persen, hal ini menggambarkan masih lemahnya keterwakilan perempuan yang berkecimpung di parlemen.

Paling tinggi keterwakilan perempuan di parlemen adalah DPRD Provinsi Riau, yang pada tahun 2020 mencapai 18,46 Persen dan terakhir tahun 2024 turun sehingga menjadi 16,92 persen, sementara DPRD Kabupaten/Kota yang keterwakilan perempuannya rata-rata masih sangat rendah dari hasil Pemilu Legislatif pada Tahun 2024, tetapi dari semua daerah baik Provinsi, Kabupaten dan Kota, keterwakilan Perempuan di Parlemen tetap ada, walaupun sangat rendah dari ambang batas yang telah ditentukan.

Tabel 2.2.6
Rekapitulasi Jumlah Pemilih Disabilitas untuk Pemilu 2024

No	Wilayah	Fisik	Intelektual	Mental	Sensorik Wicara	Sensorik Rungu	Sensorik Netra
1	Kampar	862	126	534	304	72	141
2	Indragiri Hulu	667	100	301	192	76	132
3	Bengkalis	792	101	481	210	46	153
4	Indragiri Hilir	798	112	403	227	97	207
5	Pelalawan	463	61	207	118	37	97
6	Rokan Hulu	710	78	320	213	65	112
7	Rokan Hilir	689	73	356	181	50	135
8	Siak	476	72	224	138	32	78
9	Kuantan Singingi	443	60	192	145	48	109
10	Kepulauan Meranti	511	88	196	151	44	131
11	Kota Pekanbaru	595	77	512	206	36	133
12	Kota Dumai	437	66	198	94	27	71
JUMLAH		7443	1014	3924	2179	630	1499

Sumber : Aplikasi Sidalih KPU

Jumlah Organisasi Masyarakat (ORMAS)/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan yayasan yang terdaftar pada tahun 2017 hingga 2024 berjumlah 341. Dimana jumlah ormas tertinggi pada tahun 2023 sebesar 43 sedangkan LSM di tahun 2020 sebesar 11 dan untuk jumlah Yayasan pada tahun 2022 sebanyak 14 yayasan. Hal ini mengalami peningkatan pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 sebesar 8 yayasan, sedangkan pada tahun 2024 jumlah Ormas/LSM dan Yayasan yang terdaftar mengalami penurunan dengan jumlah 37 Ormas/LSM dan Yayasan. Yang terdiri dari Ormas sejumlah 31, LSM sejumlah 2 dan Yayasan sejumlah 4.

Tabel 2.2.7
Jumlah Ormas/LSM, Yayasan yang Terdaftar pada
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau
Tahun 2017–2024

No	Tahun	Ormas	LSM	Yayasan	Jumlah
1	2017	23	5	12	40
2	2018	20	1	6	27
3	2019	34	4	7	45
4	2020	33	11	4	48
5	2021	29	5	5	39
6	2022	33	8	14	55
7	2023	43	4	3	50
8	2024	31	2	4	37
Total		246	40	55	341

Sumber : Bakesbangpol Provinsi Riau

Tabel 2.2.8
Jumlah Ormas/LSM/Yayasan Bidang Disabilitas Yang
Terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Riau

No	Nama Ormas / LSM / Yayasan	Tahun Mendaftar
1	Korps Cacat Veteran RI Provinsi Riau	2012
2	Perkumpulan Kesejahteraan Penyandang Cacat (PKPC)	2012
3	Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Provinsi Riau	2015
4	Forum Komunikasi Keluarga Anak Dengan Kecatatan Provinsi Riau	2016
5	DPD Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Provinsi Riau	2017
6	Perkumpulan Penyandang Disabilitas Fisik Indonesia Provinsi Riau	2021
7	Yayasan Insan Berguna Nusantara (IBNU)	2022
8	Perkumpulan Sepakbola Amputasi Indonesia Provinsi Riau	2023

Sumber : Bakesbangpol Provinsi Riau

Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Provinsi Riau tahun 2024 mengalami kenaikan yang sangat signifikan di 5 (lima) tahun terakhir yakni sebesar 84,23 dengan status kondisi rukun, hal ini dikarenakan 2 (dua) dimensi mengalami kenaikan, yang meliputi dimensi kesetaraan tahun 2023 sebesar 77,61 naik di tahun 2024 sebesar 84,92 dan dimensi kerjasama tahun 2023 sebesar 75,59 naik di tahun 2024 sebesar 84,38. Sehingga Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Provinsi Riau tahun 2024 masih di atas rata – rata nasional, dengan nilai yang mengalami kenaikan signifikan tersebut maka secara peringkat Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Provinsi Riau tahun 2024 juga mengalami kenaikan yakni mendapatkan peringkat 2 secara nasional dan hanya kalah dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Tabel 2.2.9
Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)
Provinsi Riau Tahun 2020-2024

No	Indeks	Tahun									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		Realisasi (Skor)	Status Kondisi	Realisasi (Skor)	Status Kondisi	Realisasi (Skor)	Status Kondisi	Realisasi (Skor)	Status Kondisi	Realisasi (Skor)	Status Kondisi
1	Kesetaraan	68,30	Rukun	69,20	Rukun	75,32	Rukun	77,61	Rukun	84,92	Rukun
2	Toleransi	68,30	Rukun	60,80	Rukun	70,39	Rukun	74,46	Rukun	72,50	Rukun
3	Kerjasama	71,18	Rukun	70,00	Rukun	73,65	Rukun	75,59	Rukun	84,38	Rukun
Skor Nasional		67,46	Rukun	72,39	Rukun	73,09	Rukun	76,02	Rukun	76,47	Rukun
Skor IKUB Riau		69,26	Rukun	66,67	Rukun	74,32	Rukun	71,60	Rukun	84,23	Rukun
Peringkat		31		31		16		31		2	

Sumber : Kanwil Kemenag Provinsi Riau

Dalam rangka menciptakan keamanan dan kenyamanan masyarakat terhadap penyakit masyarakat, potensi konflik dan kriminalitas yang mungkin terjadi, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan penyuluhan atau sosialisasi mengenai premanisme, minuman keras, penyebaran HIV/AIDS, Narkoba dan pencegahan perselisihan antar kelompok masyarakat. Untuk deteksi dini konflik selalu dilaksanakan rapat-rapat koordinasi melalui forum komunitas intelijen daerah yang hasil rekomendasi dari forum komunitas intelijen daerah menjadi bahan pertimbangan bagi pimpinan daerah dalam mengambil kebijakan untuk mengantisipasi konflik yang mungkin terjadi.

Tabel 2.2.10
Angka Kriminalitas Tahun 2020-2024 di Provinsi Riau

Kasus	ANGKA KRIMINALITAS				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kejadian Kriminilitas	6.526	7.512	5.258	3.861	8.273
Jumlah Penduduk	6.394.087	6.493.603	6.614.384	6.642.874	6.794.944
Rasio	0,0010	0,0012	0,0008	0,00058	0,0012

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau, Tahun 2024

Berdasarkan data jumlah konflik yang ada dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2024 kejadian konflik di Provinsi Riau menurun dari 145 kejadian konflik menjadi 19 kejadian konflik. Namun dari jenis konflik yang ada jenis konflik Sosial Budaya dan Wilayah yang masih tinggi dan mengalami tetapi mengalami penurunan.

Tabel 2.2.11
Data Jumlah Konflik di Provinsi Riau
(Tahun 2020 s/d 2024)

No	Jenis Konflik	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Sosial Budaya (Sosbud)	102	28	35	31	3
2	Wilayah	15	54	51	2	15
3	SARA	11	8	4	-	1
4	Sumber Daya Alam (SDA)	26	-	-	-	-
Jumlah		154	90	90	33	19

Sumber : Bakesbangpol Provinsi Riau

Dari data angka unjuk rasa, kriminalitas dan konflik terjadi di Provinsi Riau, yang terjadi beberapa tahun terakhir mengalami penurunan sehingga bisa di kategorikan berhasil di kendalikan.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel 2.2.12 :

Tabel 2.2.12
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Provinsi Riau

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi			Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM													
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK													
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK													
	Indeks Kerukunan Umat Beragama			73,79	75,11	76,01	76,92	66,67	74,32	71,60	75,11	76,01	76,92	
	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)			73,60	79,16	80,31	81,46	75,66	75,66	75,55	79,16	80,31	81,46	
	Indeks Toleransi Umat Beragama			72,50	72,83	74,15	75,96	60,80	68,45	74,46	72,83	74,15	75,96	
	Indeks Kerjasama Umat Beragama			74,15	75,71	77,03	78,84	70,00	77,65	75,59	75,71	77,03	78,84	
	Persentase Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial			74,50	75,00	75,50	76,00	74,50	75,00	75,50	75,00	75,50	76,00	
	Indeks Kebebasan			88,40	89,15	89,90	90,65	88,40	88,40	79,39	85,78	86,93	90,65	
	Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi			62,83	63,58	64,33	65,08	62,83	62,83	66,30	88,38	89,53	65,08	

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi			Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Masyarakat yang Paham terhadap Nilai – nilai Wawasan Kebangsaan			-	75,00	75,50	76,00	-	75,00	75,50	75,00	75,50	76,00	
	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi			3,13	3,13	3,15	3,17	3,13	2,93	3,00	3,13	3,15	3,17	
	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Politik			3,24	3,24	3,26	3,28	3,24	3,24	3,29	3,24	3,26	3,28	
	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu			69,54	69,54	69,54	75,50	69,54	69,54	69,54	69,54	69,54	75,50	
	Persentase Ormas yang Berfungsi sesuai Regulasi			75,00	75,00	75,05	75,10	75,00	75,00	75,05	75,00	75,05	75,10	
	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi			3,10	3,10	3,12	3,14	3,10	3,11	3,16	3,10	3,12	3,14	
	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya			2,92	2,92	2,94	2,96	2,92	2,86	2,93	2,92	2,94	2,96	
	Persentase Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial			75,00	75,00	75,05	75,10	75,00	75,00	75,05	75,00	75,05	75,10	

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

A. Kinerja Pelayanan OPD

Isu strategis yang berkembang dan aktual terkait dengan tugas dan fungsi serta urusan pemerintahan daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

1. Kerukunan Umat Beragama;
2. Pemahaman Kehidupan Berdemokrasi.

Metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana. Dalam merumuskan isu strategis dilakukan langkah sebagai berikut :

1. Penentuan Isu Strategis Dalam menentukan isu strategis, harus disesuaikan dengan jenis dokumen yang akan disusun, apakah itu jangka panjang (20 tahun) jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek (1 tahun). Jika suatu isu strategis berpotensi muncul dalam kurun waktu sesuai masing-masing jenis dokumen, maka isu strategis itu dapat dimasukkan. Namun jika suatu isu strategis berpotensi muncul dalam diluar (lebih dari) kurun waktu sesuai masing-masing jenis dokumen, maka sebaiknya tidak usah dimasukkan ke dalam dokumen.
2. Pembobotan setelah diidentifikasi isu strategis yang ada kemudian masing-masing isu dibobot. Dalam menentukan pembobotan dilakukan FGD untuk memahami usulan dan masukan tentang berbagai isu strategis. Pembobotan dilakukan untuk menentukan mana isu strategis yang

paling prioritas dan akan dijadikan dasar bagi penyusunan visi dan misi.

B. Permasalahan yang Dihadapi

Dari dinamika sosial politik yang berkembang di masyarakat Indonesia pada umumnya dan Provinsi Riau pada khususnya, maka masalah-masalah yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau, sebagai berikut :

1. Masih adanya konflik dimasyarakat yang berhubungan dengan Wilayah Perbatasan Daerah, Kepemilikan Lahan, dan Konflik yang berhubungan dengan SARA;
2. Masih tingginya kriminalitas, pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN);
3. Belum mantapnya wawasan kebangsaan dikalangan masyarakat;
4. Belum lancarnya proses pembauran bangsa dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa yang berwawasan global;
5. Belum optimalnya pelaksanaan demokrasi di Indonesia khususnya Provinsi Riau.

C. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian Program Nasional

Program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau dasar hukum pelaksanaannya mengacu kepada Permendagri, misalnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri

Nomor 08 dan Nomor 09 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam memelihara kerukunan umat beragama Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat beragama dan Pembangunan Rumah Ibadah, hal ini akan berdampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah terhadap pencapaian Program Nasional sehingga pelaksanaan Program dan Kegiatan akan menunjang Program dan Kegiatan Nasional seperti Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Program Pendidikan Politik.

D. Tantangan dan Peluang

Adapun tantangan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau antara lain :

- a. Relatif rendahnya pemahaman generasi muda terhadap Pancasila, UUD 1945, ke-bhinneka-an, NKRI, demokratisasi, revolusi karakter bangsa dan restorasi sosial budaya serta stabilitas Riau dalam rangka memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan;
- b. Belum tertatanya struktur politik, pemantapan budaya politik, dinamika politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan politik dalam negeri yang lebih demokratis;
- c. Pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) di Provinsi Riau;
- d. Terdapat gejala menurunnya tingkat toleransi antar umat beragama, yang berpotensi menimbulkan ketidak harmonisan hubungan antar umat beragama/penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME dalam masyarakat;
- e. Masih adanya sikap diskriminatif dari kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas di masyarakat;

- f. Masih adanya aksi dan kegiatan terorisme atau kekerasan atas nama agama akibat aktualisasi pemahaman keagamaan secara salah, sehingga Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Riau akan berpengaruh.

Dari tantangan diatas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau memiliki sejumlah peluang sebagai berikut :

- a. Semakin membaiknya pemahaman akan keanekaragaman budaya nilai-nilai kebangsaan yang dapat meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa;
- b. Kesadaran masyarakat untuk menjaga eksistensi bangsa melalui peningkatan wawasan kebangsaan, penanganan konflik dan peningkatan kewaspadaan dini;
- c. Kesadaran dan partisipasi masyarakat Riau dalam berpolitik saat ini terus tumbuh;
- d. Semakin kuatnya kelembagaan demokrasi sebagai penampung aspirasi masyarakat;
- e. Stabilitasnya sistem politik Riau sehingga memberikan ruang bagi pengembangan sistem politik yang demokratis, melalui Pemilu dan Pilkada serentak.

E. Rekomendasi untuk ditindaklanjuti

Untuk menyikapi isu-isu strategis yang ada di Riau tersebut diperlukan solusi atau rekomendasi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Adapun rekomendasi yang dapat diambil sebagai berikut :

1. Merevitalisasi dan mengaktualisasikan Nilai-nilai Pancasila di Lingkungan Provinsi Riau;
2. Pelaksanaan Pemantapan Wawasan Kebangsaan;
3. Pelaksanaan Pemantapan Kesadaran Bela Negara;

4. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Ketahanan Ideologi, Pembauran dan Kewarganegaraan se-Provinsi Riau;
5. Melakukan Pembinaan Pembauran Kebangsaan;
6. Penguatan Pendidikan Karakter;
7. Pelaksanaan Jambore dan Hut Bela Negara se Provinsi Riau;
8. Memberikan pemahaman akan pentingnya pelestarian dan pengamalan nilai-nilai dan etika budaya bangsa di masyarakat;
9. Melakukan Pengawasan Orang Asing yang terencana dan terukur;
10. Penguatan Kewaspadaan Dini di Provinsi Riau;
11. Pencegahan Konflik Sosial;
12. Melakukan Konsolidasi Ketahanan Nasional wilayah di daerah Provinsi Riau;
13. Melakukan Koordinasi dan Monitoring Ketahanan Ekonomi dan Sumber Daya Alam Dalam Rangka Kewaspadaan Nasional;
14. Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama dan Bermasyarakat;
15. Melaksanakan Dialog Partai Politik Se - Provinsi Riau;
16. Melakukan Monitoring dan Peliputan Pemilu/Pilkada Kabupaten/Kota;
17. Melakukan sosialisasi terkait etika dan budaya politik demokrasi yang berdampak pada penurunan tingkat partisipasi politik masyarakat terutama pemilih pemula dan kaum wanita, baik dalam pemilu maupun proses pengambilan keputusan kebijakan publik, di masyarakat;
18. Pengembangan Kapasitas Partai Politik se-Provinsi Riau;

19. Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilu dan Pilkada;
20. Melakukan Sosialisasi Pendidikan Politik Bagi Calon Pemilih Pemula;
21. Melakukan Pembinaan dan Pengembangan Ormas dan LSM di Provinsi Riau dan Kab/Kota;
22. Meningkatkan Kinerja Pokja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) untuk menyusun Rencana Aksi guna peningkatan skor IDI;
23. Pelaksanaan Komunikasi Politik, Parpol Terhadap Masyarakat.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan langkah awal ataupun dasar bagi setiap OPD dalam menyusun Renja SKPD. Dalam rancangan awal RKPD tercantum program-program yang dijadikan pedoman perencanaan pembangunan dengan membandingkan antara program pembangunan dari Pemerintah Provinsi dengan kebutuhan masyarakat setelah dilakukan analisis kebutuhan masyarakat sehingga akan menghasilkan program-program prioritas untuk dijadikan rencana pembangunan Provinsi.

Rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau telah tersusun 6 (enam) Program yang terjabar dalam 13 (tiga belas) Kegiatan dan 65 (enam puluh lima) Sub Kegiatan.

Hal ini telah disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemuktahiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 23 tahun 2024 tentang Rencana Kerja

Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau tahun 2025.

Matriks perbandingan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah dirancang dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025 serta kebutuhan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel 2.4. :

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Provinsi Riau

Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				46,477,059,211.00	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				20,236,483,345.00	
8.01.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				46,477,059,211.00	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				20,236,483,345.00	
0.00.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100 Persen	17,980,017,559.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100 Persen	14,972,100,824.00	
0.00.01.1.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	462,678,307.00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	125,269,811.00	
0.00.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pekanbaru	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	462,678,307.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pekanbaru	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	125,269,811.00	
0.00.01.1.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang dipenuhi	1 Laporan	12,299,677,924.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang dipenuhi	1 Laporan	11,977,537,264.00	
0.00.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pekanbaru	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang	12,299,677,924.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pekanbaru	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	88 Orang	11,977,537,264.00	
0.00.01.1.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2 Laporan	160,000,000.00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat	2 Laporan	85,000,000.00	
0.00.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Pekanbaru	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	20,000,000.00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Pekanbaru	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	15,000,000.00	
0.00.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Pekanbaru	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	140,000,000.00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Pekanbaru	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada	6 Laporan	70,000,000.00	
0.00.01.1.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian yang difasilitasi	2 Jenis	175,000,000.00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian yang difasilitasi	2 Jenis	110,000,000.00	
0.00.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Pekanbaru	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket	150,000,000.00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Pekanbaru	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	95,000,000.00	
0.00.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Pekanbaru	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	25,000,000.00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Pekanbaru	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	15,000,000.00	
0.00.01.1.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	9 Jenis	1,528,995,483.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	9 Jenis	997,491,749.00	
0.00.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pekanbaru	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	19,991,749.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pekanbaru	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	19,991,749.00	
0.00.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pekanbaru	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	319,657,234.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pekanbaru	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	175,000,000.00	
0.00.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Pekanbaru	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	60,000,000.00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Pekanbaru	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	30,000,000.00	
0.00.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pekanbaru	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	2 Paket	200,000,000.00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pekanbaru	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	2 Paket	100,000,000.00	
0.00.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Pekanbaru	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	65,000,000.00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Pekanbaru	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	35,000,000.00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
0.00.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Kota Pekanbaru	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	10,000,000.00	Penyediaan Bahan/Material	Kota Pekanbaru	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	7,500,000.00	
0.00.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Pekanbaru	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	75,000,000.00	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Pekanbaru	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	50,000,000.00	
0.00.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi Riau	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	96 Laporan	729,346,500.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi Riau	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90 Laporan	550,000,000.00	
0.00.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Pekanbaru	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10 Dokumen	50,000,000.00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Pekanbaru	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10 Dokumen	30,000,000.00	
0.00.01.1.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	6 Jenis	833,200,000.00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	6 Jenis	258,200,000.00	
0.00.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Kota Pekanbaru	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	63,200,000.00	Pengadaan Mebel	Kota Pekanbaru	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	43,200,000.00	
0.00.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pekanbaru	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	50,000,000.00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pekanbaru	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	25,000,000.00	
0.00.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kota Pekanbaru	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	2 Unit	20,000,000.00	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kota Pekanbaru	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	2 Unit	15,000,000.00	
0.00.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pekanbaru	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	1 Unit	200,000,000.00	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pekanbaru	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	1 Unit	75,000,000.00	
0.00.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pekanbaru	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit	350,000,000.00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pekanbaru	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	-	
0.00.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pekanbaru	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	150,000,000.00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pekanbaru	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	100,000,000.00	
0.00.01.1.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	4 Jenis	1,637,755,845.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	4 Jenis	845,892,000.00	
0.00.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pekanbaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 Laporan	10,000,000.00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pekanbaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	250 Laporan	5,000,000.00	
0.00.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pekanbaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	360,000,000.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pekanbaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	360,000,000.00	
0.00.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pekanbaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	35,892,000.00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pekanbaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	30,892,000.00	1.Hibah Uang Kepada FPK Prov. Riau Rp. 2.012.825.000
0.00.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pekanbaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	11 Laporan	1,231,863,845.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pekanbaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	450,000,000.00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
0.00.01.1.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	8 Jenis	882,710,000.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	8 Jenis	572,710,000.00	
0.00.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pekanbaru	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	218,830,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pekanbaru	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	218,830,000.00	
0.00.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pekanbaru	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	85,880,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pekanbaru	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	85,880,000.00	
0.00.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Kota Pekanbaru	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	8,000,000.00	Pemeliharaan Mebel	Kota Pekanbaru	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	8,000,000.00	
0.00.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kota Pekanbaru	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	20,000,000.00	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kota Pekanbaru	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	10,000,000.00	
0.00.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pekanbaru	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	150,000,000.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pekanbaru	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	75,000,000.00	
0.00.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pekanbaru	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	200,000,000.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pekanbaru	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	75,000,000.00	
0.00.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pekanbaru	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	200,000,000.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pekanbaru	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	100,000,000.00	
8.01.02.	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		Persentase Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila	85.00 Persen	5,323,630,401.00	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		Persentase Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila	85.00 Persen	2,583,761,276.00	
8.01.02.1.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Persentase pemantapan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 Persen	5,323,630,401.00	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Persentase pemantapan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 Persen	2,583,761,276.00	
8 01 02 1.01 0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Pekanbaru	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	1 Dokumen	8,000,000.00	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Pekanbaru	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	1 Dokumen	4,000,000.00	
8 01 02 1.01 0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Pekanbaru	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	1 Dokumen	5,000,000.00	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Pekanbaru	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	1 Dokumen	2,500,000.00	
8 01 02 1.01 0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Provinsi Riau	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	250 Orang	1,925,587,238.00	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Provinsi Riau	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	75 Orang	100,000,000.00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
8.01.02.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Provinsi Riau	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	80 Orang	117,962,799.00	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Provinsi Riau	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	40 Orang	50,000,000.00	
8.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Provinsi Riau	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 Laporan	180,539,894.00	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Provinsi Riau	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 Laporan	80,000,000.00	
8.01.02.1.01.0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Provinsi Riau	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	1 Dokumen	169,529,333.00	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Provinsi Riau	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	1 Dokumen	60,000,000.00	
8.01.02.1.01.0007	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Provinsi Riau	Terbentuknya Purnapaskibraka Duta Pancasila	36 Orang	30,161,276.00	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Provinsi Riau	Terbentuknya Purnapaskibraka Duta Pancasila	36 Orang	15,161,276.00	
8.01.02.1.01.0008	Pembinaan Terhadap Aktivitas Kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Provinsi Riau	Terlaksananya Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	1 Dokumen	4,600,000.00	Pembinaan Terhadap Aktivitas Kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Provinsi Riau	Terlaksananya Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	1 Dokumen	2,100,000.00	
8.01.02.1.01.0009	Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Provinsi Riau	Terlaksananya Penugasan Paskibraka	1 Dokumen	930,860,157.00	Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Provinsi Riau	Terlaksananya Penugasan Paskibraka	1 Dokumen	400,000,000.00	
8.01.02.1.01.0010	Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Provinsi Riau	Terlaksananya Penugasan Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 Dokumen	25,310,350.00	Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Provinsi Riau	Terlaksananya Penugasan Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 Dokumen	10,000,000.00	
8.01.02.1.01.0011	Pembinaan Lanjutan Kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Provinsi Riau	Terlaksananya Pembinaan Lanjutan Kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 Dokumen	26,079,354.00	Pembinaan Lanjutan Kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Provinsi Riau	Terlaksananya Pembinaan Lanjutan Kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 Dokumen	10,000,000.00	
8.01.02.1.01.0012	Pembentukan Paskibraka	Provinsi Riau	Terbentuknya Pasukan Pengibar Bendera Pusaka	36 Orang	1,900,000,000.00	Pembentukan Paskibraka	Provinsi Riau	Terbentuknya Pasukan Pengibar Bendera Pusaka	36 Orang	1,850,000,000.00	
8.01.03.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		Indeks Ketahanan Nasional Gatra Politik	3.34 Nilai	17,012,319,640.00	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		Indeks Ketahanan Nasional Gatra Politik	3.34 Nilai	397,000,000.00	
8.01.03.1.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Persentase Pemantapan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi dan Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	100 Persen	17,012,319,640.00	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Persentase Pemantapan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi dan Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	100 Persen	397,000,000.00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
8 01 03 1.01 0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Pekanbaru	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	13,095,840.00	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Pekanbaru	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	8,000,000.00	
8 01 03 1.01 0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Provinsi Riau	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	15,405,514.00	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Provinsi Riau	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	9,000,000.00	
8.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Provinsi Riau	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	400 Orang	16,611,839,536.00	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Provinsi Riau	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	150 Orang	200,000,000.00	
8.01.03.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Provinsi Riau	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	300 Orang	184,431,250.00	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Provinsi Riau	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	50 Orang	80,000,000.00	
8.01.03.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Provinsi Riau	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 Laporan	187,547,500.00	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Provinsi Riau	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 Laporan	100,000,000.00	
8.01.04.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		Persentase Ormas yang Berfungsi sesuai Regulasi	76.00 Persen	467,510,999.00	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		Persentase Ormas yang Berfungsi sesuai Regulasi	76.00 Persen	342,000,000.00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
8.01.04.1.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Persentase Pemantapan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100 Persen	467,510,999.00	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Persentase Pemantapan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100 Persen	342,000,000.00	
8 01 04 1.01 0001	Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Pekanbaru	Jumlah Dokumen Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	8,000,000.00	Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Pekanbaru	Jumlah Dokumen Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	5,000,000.00	
8 01 04 1.01 0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Pekanbaru	Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	8,000,000.00	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Pekanbaru	Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	5,000,000.00	
8.01.04.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Provinsi Riau	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100 Orang	113,200,749.00	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Provinsi Riau	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100 Orang	100,000,000.00	
8 01 04 1.01 0004	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Provinsi Riau	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	50 Orang	212,412,000.00	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Provinsi Riau	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	50 Orang	132,000,000.00	
8.01.04.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Provinsi Riau	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 Laporan	125,898,250.00	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Provinsi Riau	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 Laporan	100,000,000.00	
8.01.05.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi	3.20 Nilai	2,189,386,500.00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi	3.20 Nilai	445,000,000.00	
			Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya	3.25 Nilai	52,510,050.00				Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya	3.25 Nilai	39,000,000.00
8.01.05.1.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Persentase Pemantapan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100 Persen	2,241,896,550.00	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Persentase Pemantapan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100 Persen	484,000,000.00	
8 01 05 1.01 0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Pekanbaru	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	37,373,690.00	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Pekanbaru	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	30,000,000.00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
8.01.05.1.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Provinsi Riau	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	15,136,360.00	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Provinsi Riau	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	9,000,000.00	
8 01 05 1.01 0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Provinsi Riau	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Orang	2,000,000,000.00	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Provinsi Riau	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	150 Orang	275,000,000.00	
8.01.05.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Provinsi Riau	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	50 Orang	76,269,000.00	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Provinsi Riau	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	50 Orang	70,000,000.00	
8.01.05.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Provinsi Riau	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 Laporan	113,117,500.00	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Provinsi Riau	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 Laporan	100,000,000.00	
8.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL.		Persentase Timdu PKS Kab/Kota yang melaksanakan RAD secara efektif	75.00 Persen	3,451,684,062.00	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL.		Persentase Timdu PKS Kab/Kota yang melaksanakan RAD secara efektif	75.00 Persen	1,457,621,245.00	
8.01.06.1.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Persentase Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100 Persen	3,451,684,062.00	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Persentase Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100 Persen	1,457,621,245.00	
8 01 06 1.01 0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Pekanbaru	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	5,000,000.00	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Pekanbaru	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	3,000,000.00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
8.01.06.1.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Pekanbaru	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	5,070,646.00	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Pekanbaru	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	3,070,646.00	
8.01.06.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Provinsi Riau	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	300 Orang	874,690,468.00	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Provinsi Riau	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	150 Orang	386,014,004.00	
8.01.06.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Provinsi Riau	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	200 Orang	420,242,650.00	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Provinsi Riau	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	150 Orang	395,504,499.00	
8.01.06.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Provinsi Riau	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	6 Laporan	280,938,229.00	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Provinsi Riau	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	6 Laporan	487,108,168.00	
8.01.06.1.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Provinsi Riau	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	1 Dokumen	1,865,742,069.00	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Provinsi Riau	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	1 Dokumen	182,923,928.00	

Pada dasarnya proses renja awal besaran pagu mengacu pada renstra perangkat daerah, sementara tahapan penyusunan renja PD dilakukan beberapa tahapan pembahasan dan juga disesuaikan dengan Pendapatan Daerah sehingga perlu pencermatan-pencermatan penggunaan anggaran pada program/kegiatan/sub kegiatan.

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Kajian usulan program dan kegiatan masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD. Kajian usulan program dan kegiatan untuk OPD Provinsi mencakup skala yang lebih besar dan ruang yang lebih luas dan merupakan pemangku kepentingan yang sangat strategis.

Kajian usulan program dan kegiatan pada tahap ini adalah berasal dari usulan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD Kab/Kota yang langsung ditujukan kepada OPD Provinsi. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau, dalam Rapat Pembahasan Forum Perangkat Daerah bersama seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab/Kota se Provinsi Riau dan Forum-forum yang dilaksanakan pada Tahun 2025, merangkum usulan-usulan kegiatan dari Forum-forum. Selain itu, usulan-usulan kegiatan ini juga diperoleh dari Partai Politik tingkat Provinsi Riau.

Adapun usulan tersebut adalah :

- a. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa (Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan) meliputi : Hibah Uang Kepada Forum Pembauran Kebangsaan (FPK);
- b. Bidang Politik Dalam Negeri (Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik) meliputi : Bantuan Keuangan Partai Politik;
- c. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan (Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya) meliputi : Hibah Uang Kepada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB);
- d. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik (Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial) meliputi : Bantuan Uang Kepada Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).

Usulan-usulan kegiatan tersebut terangkum dalam tabel 2.5 berikut ini :

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Provinsi Riau

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
I	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan		Persentase Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila		
1	Hibah Uang Kepada Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Se-Provinsi Riau	Jumlah Orang	1,600,000,000.00	
II	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik		Indeks Ketahanan Nasional Gatra Politik		
1	Bantuan Keuangan Partai Politik	Se-Provinsi Riau	Jumlah Parpol	16,188,305,000.00	
III	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya		Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi		
			Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya		
1	Hibah Uang Kepada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Se-Provinsi Riau	Jumlah Orang	1,500,000,000.00	
IV	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial		Persentase Timdu PKS Kab/Kota yang melaksanakan RAD secara efektif		
1	Hibah Uang Kepada Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Se-Provinsi Riau	Jumlah Orang	500,000,000.00	
Jumlah				19,788,305,000.00	

Melihat dari tabel 2.5 bahwa pada renja PD terdapat pemberian hibah berupa uang kepada tiga forum yaitu :

1. FPK sebesar Rp. 1.600.000.000,-
2. FKUB sebesar Rp. 1.500.000.000,-
3. FKDM sebesar Rp. 500.000.000,-

Pemberian hibah uang ini berdasarkan amanat Permendagri yang tugas dan fungsinya mendukung dan sinergi dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau, selain itu pemberian hibah uang ini merupakan kebijakan pemerintah daerah yang secara khusus ditugaskan untuk menangani misalnya peningkatan wawasan kebangsaan dan pancasila, keagamaan, pembauran kebangsaan, dan mendeteksi dini persoalan-persoalan di Provinsi Riau.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Penetapan kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau selain mengacu pada kebijakan Pemerintah Provinsi juga merujuk pada kebijakan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri. Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum terbentuk berdasarkan Permendagri Nomor 43 Tahun 2015. Sesuai Permendagri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Renstra Kemendagri Tahun 2020 - 2024 Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum mempunyai 5 (lima) Program, yaitu :

1. Program Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan yang diarahkan pada pengembangan nilai wawasan kebangsaan dan pembauran kebangsaan serta pendidikan kewarganegaraan;
2. Program Fasilitasi Kewaspadaan Nasional yang diarahkan pada manajemen konflik, penanganan dan penyelesaian konflik, dokumen laporan situasi kondisi politik se-Indonesia, serta penyusunan rumusan kebijakan nasional berkenaan dengan kewaspadaan nasional;
3. Program Fasilitasi Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan indikator kinerja diarahkan pada Ketahanan Ekonomi dengan indikator kinerja diarahkan pada penyusunan rumusan kebijakan berkaitan dengan ketahanan ekonomi, fasilitasi, kerjasama, pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi serta laporan stabilitas ketersediaan kebutuhan bahan pokok masyarakat;

4. Program Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan dengan indikator kinerja diarahkan pada Fungsi, peran, koordinasi dan fasilitasi berkenaan dengan organisasi/lembaga kemasyarakatan (seni, budaya, agama, dan kemasyarakatan) dan forum publik, penanganan masalah sosial, serta perumusan, implementasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan-kebijakan berkenaan dengan ketahanan seni, budaya, agama, dan kemasyarakatan;
5. Program Fasilitasi Politik Dalam Negeri yang diarahkan pada pemilihan umum, partisipasi dan komunikasi politik, lembaga perwakilan, laporan dan pemantauan perkembangan politik dalam negeri, pendidikan politik masyarakat, serta penyusunan rumusan kebijakan yang berhubungan dengan politik dalam negeri.

Merujuk pada Program-Program yang ada pada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau berupaya untuk menerapkan beberapa kebijakan kiranya dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Provinsi Riau sebagai berikut :

- 1. Kesekretariatan** dengan indikator kinerja diarahkan sebagai penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi seperti Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah serta penyelenggaraan koordinasi dengan Badan/Kantor Kesbangpol Kab/Kota se Provinsi Riau.
- 2. Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan** dengan indikator kinerja diarahkan pada Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter

Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan, pembinaan, pengembangan ideologi, bela Negara, wawasan kebangsaan, pembauran kebangsaan, fasilitasi FPK, sosialisasi ideologi Negara, bela Negara, wawasan dan pembauran kebangsaan bagi masyarakat, implementasi kebijakan-kebijakan nasional maupun daerah berkenaan dengan ideologi Negara dan bela Negara, wawasan kebangsaan dan pembauran kebangsaan.

3. Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik dengan indikator kinerja diarahkan pada fasilitasi partai politik dan pemilihan umum, fasilitasi kelembagaan dan pendidikan politik, laporan dan pemantauan perkembangan politik dalam negeri, pendidikan politik masyarakat, penyusunan rumusan kebijakan yang berhubungan dengan politik dalam negeri di Provinsi Riau, peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Riau meliputi penyelenggaraan fasilitasi, mediasi dan komunikasi serta implementasi kebijakan-kebijakan nasional dan daerah berkaitan dengan Pemilu dan Plkada serentak tahun 2024.

Pemilihan umum (pemilu) termasuk juga pemilihan kepala daerah (pilkada/pemilihan) secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemilu dan pilkada secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Sebagaimana diketahui, pemilu serentak dan

pemilihan kepala daerah (pilkada/pemilihan) selanjutnya akan dilaksanakan pada tahun 2024. Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 merupakan pesta demokrasi terbesar yang akan menentukan perjalanan bangsa Indonesia dalam lima tahun ke depan. Oleh karena itu, penyelenggara pemilu harus mempersiapkan secara baik dan matang.

- 4. Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan** dengan indikator kinerja diarahkan pada fasilitasi organisasi kemasyarakatan meliputi penyelenggaraan fasilitasi, mediasi dan komunikasi serta implementasi kebijakan-kebijakan nasional dan daerah berkaitan dengan Organisasi Kemasyarakatan, pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.
- 5. Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya** dengan indikator kinerja diarahkan pada fasilitasi dan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah serta Peningkatan Indeks Ketahanan Nasional wilayah di Provinsi Riau.
- 6. Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial** dengan indikator kinerja diarahkan pada fasilitasi kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen, penanganan konflik dan pengawasan orang asing yang meliputi manajemen konflik, penanganan dan penyelesaian konflik, dokumen laporan situasi kondisi politik daerah di Riau, pendataan dan pengawasan, pemantauan orang asing,

implementasi kebijakan-kebijakan nasional dan daerah berkaitan dengan situasi dan kondisi Ipoleksosbudhankam.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan sasaran pada Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau Tahun 2026 merujuk pada tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2026. Adapun tujuan dan sasaran Rencana Kerja Tahun 2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-		
				2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatkan Kerukunan Umat Beragama		Indeks Kerukunan Umat Beragama	76,92	77,11	77,60
		Meningkatnya Toleransi dan Kerjasama Antar Umat Beragama	Indeks Toleransi Antar Umat	75,96	76,15	76,64
			Indeks Kerjasama Antar	78,84	79,03	79,52
		Menurunnya Konflik Sosial di Masyarakat	Persentase Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	76,00	76,50	77,00
2.	Meningkatkan Pemahaman Kehidupan Berdemokrasi		Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	81,46	81,50	82,00
		Meningkatnya Penerapan Demokrasi	Persentase Pemberdayaan Ormas	-	100	100
		Meningkatnya Implementasi Nilai-nilai Pancasila di Daerah	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi	3,17	3.20	3.25

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau sebagai lembaga yang membantu Gubernur dalam menjalankan pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau telah menetapkan program-program sesuai RPD (Rencana Pembangunan Daerah) Provinsi Riau Tahun 2025-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau Tahun 2025-2026.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau telah menyusun 6 (enam) program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya;
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Rencana Program dan Kegiatan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau seperti yang terdapat pada Tabel 3.3. berikut ini :

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026
dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Provinsi Riau

Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				36,054,585,212.00				45,897,830,304.00
8.01.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				36,054,585,212.00				45,897,830,304.00
0.00.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		100 Persen	14,581,294,686.00			100 Persen	17,714,788,648.00
0.00.01.1.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		7 Dokumen	75,390,457.00			7 Dokumen	462,678,307.00
0.00.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pekanbaru	7 Dokumen	75,390,457.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		7 Dokumen	462,678,307.00
0.00.01.1.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1 Laporan	11,977,537,264.00			1 Laporan	11,984,449,013.00
0.00.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pekanbaru	88 Orang	11,977,537,264.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		70 Orang	11,984,449,013.00
0.00.01.1.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		2 Laporan	59,181,511.00			2 Laporan	160,000,000.00
0.00.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Pekanbaru	2 Dokumen	8,230,844.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Dokumen	20,000,000.00
0.00.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Pekanbaru	6 Laporan	50,950,667.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6 Laporan	140,000,000.00
0.00.01.1.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		0 Jenis	-			2 Jenis	175,000,000.00
0.00.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kota Pekanbaru	0 Paket	-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Paket	150,000,000.00
0.00.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Pekanbaru	0 Dokumen	-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	25,000,000.00
0.00.01.1.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah		9 Jenis	1,201,872,488.00			9 Jenis	1,528,995,483.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0.00.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Pekanbaru	1 Paket	19,981,840.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Paket	19,991,749.00
0.00.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Pekanbaru	5 Paket	154,495,000.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		7 Paket	319,657,234.00
0.00.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Pekanbaru	1 Paket	36,328,860.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Paket	60,000,000.00
0.00.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Pekanbaru	2 Paket	179,333,885.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Paket	200,000,000.00
0.00.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Pekanbaru	1 Paket	44,110,779.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Paket	65,000,000.00
0.00.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kota Pekanbaru	1 Paket	7,500,000.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Paket	10,000,000.00
0.00.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Pekanbaru	1 Laporan	26,250,000.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Laporan	75,000,000.00
0.00.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi Riau	150 Laporan	703,872,124.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		96 Laporan	729,346,500.00
0.00.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Pekanbaru	10 Dokumen	30,000,000.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10 Dokumen	50,000,000.00
0.00.01.1.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1 Jenis	54,544,690.00			6 Jenis	833,200,000.00
0.00.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Pekanbaru	0 Paket	-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5 Paket	63,200,000.00
0.00.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Pekanbaru	2 Unit	37,000,000.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Unit	50,000,000.00
0.00.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Kota Pekanbaru	2 Unit	17,544,690.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Unit	20,000,000.00
0.00.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Pekanbaru	0 Unit	-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Unit	200,000,000.00
0.00.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Pekanbaru	0 Unit	-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20 Unit	350,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0.00.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Pekanbaru	0 Unit	-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Unit	150,000,000.00
0.00.01.1.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Jenis	775,258,276.00			4 Jenis	1,637,755,845.00
0.00.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pekanbaru	0 Laporan	-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		500 Laporan	10,000,000.00
0.00.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Pekanbaru	2 Laporan	338,232,312.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Laporan	360,000,000.00
0.00.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Pekanbaru	3 Laporan	40,887,500.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Laporan	35,892,000.00
0.00.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Pekanbaru	5 Laporan	396,138,464.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		11 Laporan	1,231,863,845.00
0.00.01.1.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan baang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		8 Jenis	437,510,000.00			8 Jenis	932,710,000.00
0.00.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kota Pekanbaru	6 Unit	218,830,000.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6 Unit	218,830,000.00
0.00.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Pekanbaru	15 Unit	43,680,000.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15 Unit	85,880,000.00
0.00.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kota Pekanbaru	0 Unit	-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5 Unit	8,000,000.00
0.00.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Kota Pekanbaru	0 Unit	-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4 Unit	20,000,000.00
0.00.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Pekanbaru	0 Unit	-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Unit	200,000,000.00
0.00.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Pekanbaru	1 Unit	175,000,000.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Unit	200,000,000.00
0.00.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Pekanbaru	0 Unit	-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Unit	200,000,000.00
8.01.02.	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila		85.00 Persen	2,400,000,000.00			85.00 Persen	6,823,630,402.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8.01.02.1.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase pemantapan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		100 Persen	2,400,000,000.00			100 Persen	6,823,630,402.00
8 01 02 1.01 0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Kota Pekanbaru	0 Dokumen		Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	8,000,000.00
8 01 02 1.01 0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Kota Pekanbaru	0 Dokumen		Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	5,000,000.00
8 01 02 1.01 0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Provinsi Riau	150 Orang	500,000,000.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		250 Orang	2,175,587,239.00
8.01.02.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Provinsi Riau	0 Orang		Pendapatan Asli Daerah (PAD)		80 Orang	117,962,799.00
8.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Provinsi Riau	0 Laporan		Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Laporan	180,539,894.00
8.01.02.1.01.0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Provinsi Riau	0 Dokumen		Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	169,529,333.00
8.01.02.1.01.0007	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terbentuknya Purnapaskibraka Duta Pancasila	Provinsi Riau	0 Orang		Pendapatan Asli Daerah (PAD)		36 Orang	30,161,276.00
8.01.02.1.01.0008	Pembinaan Terhadap Aktivitas Kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Terlaksananya Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Provinsi Riau	0 Dokumen		Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	4,600,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8.01.02.1.01.0009	Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Terlaksananya Penugasan Paskibraka	Provinsi Riau	1 Dokumen	50,000,000.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	1,080,860,157.00
8.01.02.1.01.0010	Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terlaksananya Penugasan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Provinsi Riau	0 Dokumen	-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	25,310,350.00
8.01.02.1.01.0011	Pembinaan Lanjutan Kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terlaksananya Pembinaan Lanjutan Kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Provinsi Riau	0 Dokumen	-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	26,079,354.00
8.01.02.1.01.0012	Pembentukan Paskibraka	Terbentuknya Pasukan Pengibar Bendera Pusaka	Provinsi Riau	36 Orang	1,850,000,000.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		36 Orang	3,000,000,000.00
8.01.03.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Politik		3.34 Nilai	16,338,304,905.00			3.34 Nilai	15,198,319,643.00
8.01.03.1.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Pematapan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi dan Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		100 Persen	16,338,304,905.00			100 Persen	15,198,319,643.00
8 01 03 1.01 0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Kota Pekanbaru	0 Dokumen	-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	13,095,840.00
8 01 03 1.01 0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Provinsi Riau	0 Dokumen	-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	15,405,514.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Provinsi Riau	150 Orang	16,292,604,905.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		400 Orang	14,797,839,539.00
8.01.03.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Provinsi Riau	50 Orang	2,300,000.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		300 Orang	184,431,250.00
8.01.03.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Provinsi Riau	1 Laporan	43,400,000.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Laporan	187,547,500.00
8.01.04.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas yang Berfungsi sesuai Regulasi		75.00 Persen	25,550,000.00			76.00 Persen	467,510,999.00
8.01.04.1.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Pemantapan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		100 Persen	25,550,000.00			100 Persen	467,510,999.00
8 01 04 1.01 0001	Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Kota Pekanbaru	0 Dokumen		Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	8,000,000.00
8 01 04 1.01 0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Kota Pekanbaru	0 Dokumen		Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	8,000,000.00
8.01.04.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Provinsi Riau	0 Orang		Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100 Orang	113,200,749.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8 01 04 1.01 0004	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Provinsi Riau	146 Orang	25,550,000.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50 Orang	212,412,000.00
8.01.04.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Provinsi Riau	0 Laporan	-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Laporan	125,898,250.00
8.01.05.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi		3.20 Nilai	1,374,435,556.00			3.20 Nilai	2,189,386,500.00
		Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya		3.25 Nilai	-			3.25 Nilai	52,510,050.00
8.01.05.1.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Pemantapan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		100 Persen	1,374,435,556.00			100 Persen	2,241,896,550.00
8 01 05 1.01 0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Kota Pekanbaru	0 Dokumen	-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	37,373,690.00
8.01.05.1.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Provinsi Riau	0 Dokumen	-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	15,136,360.00
8 01 05 1.01 0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Provinsi Riau	90 Orang	1,275,415,556.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100 Orang	2,000,000,000.00
8.01.05.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Provinsi Riau	0 Orang	-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50 Orang	76,269,000.00
8.01.05.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Provinsi Riau	1 Laporan	99,020,000.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Laporan	113,117,500.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Timdu PKS Kab/Kota yang melaksanakan RAD secara efektif		75.00 Persen	1,335,000,065.00			75.00 Persen	3,451,684,062.00
8.01.06.1.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		100 Persen	1,335,000,065.00			100 Persen	3,451,684,062.00
8 01 06 1.01 0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Kota Pekanbaru	1 Dokumen	153,650.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	5,000,000.00
8 01 06 1.01 0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Kota Pekanbaru	1 Dokumen	153,650.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	5,070,646.00
8 01 06 1.01 0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Provinsi Riau	50 Orang	331,320,000.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		300 Orang	874,690,468.00
8.01.06.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Provinsi Riau	80 Orang	33,970,265.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		200 Orang	420,242,650.00
8.01.06.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Provinsi Riau	6 Laporan	231,752,500.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6 Laporan	280,938,229.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8.01.06.1.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Provinsi Riau	1 Dokumen	737,650,000.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	1,865,742,069.00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau Tahun 2026 tertuang dalam tabel 4.1 sebagai berikut :

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI RIAU
TAHUN 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						36.054.585.212,00								43.542.067.896,00	
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						36.054.585.212,00							43.542.067.896,00		
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						36.054.585.212,00							43.542.067.896,00		
1.	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</i>	-			100 Persen	14.581.294.686,00						-	16.338.588.648,00		
		[Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran]	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	100	100	14.581.294.686,00	-	-	-	-	-	-	16.338.588.648,00	-	
	8.01.01.1.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	-			7 Dokumen	75.390.457,00					ASN, Instansi Terkait Provinsi dan Kab/ Kota	-	462.678.307,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				7 Dokumen	75.390.457,00	Kota Pekanbaru, Sail, Sukamaju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN, Instansi Terkait Provinsi dan Kab/ Kota		462.678.307,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang dipenuhi</i>	-			1 Laporan	11.977.537.264,00					Aparatur Sipil Negara	-	11.984.449.013,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				88 Orang/ Bulan	11.977.537.264,00	Kota Pekanbaru, Sail, Sukamaju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Aparatur Sipil Negara		11.984.449.013,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Jumlah Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	-			2 Laporan	59.181.511,00					Aparatur Sipil Negara	-	160.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD															
			<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>				2 Dokumen	8.230.844,00	Kota Pekanbaru, Sail, Sukamaju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Sipil Negara		20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD															
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				6 Laporan	50.950.667,00	Kota Pekanbaru, Sail, Sukamaju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Sipil Negara		140.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi</i>	-			9 Jenis	1.201.872.488,00					Aparatur Sipil Negara	-	1.528.995.483,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				150 Laporan	703.872.124,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Sukamaju Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Sipil Negara		729.346.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>				10 Dokumen	30.000.000,00	Kota Pekanbaru, Sail, Sukamaju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Sipil Negara		50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan</i>	-			6 Jenis	54.544.690,00			-	-	Aparatur Sipil Negara	-	70.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				2 Unit	37.000.000,00	Kota Pekanbaru, Sail, Sukamaju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Sipil Negara		50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				2 Unit	17.544.690,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Sipil Negara		20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	-			4 Jenis	775.258.276,00			-	-	Aparatur Sipil Negara	-	1.627.755.845,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	338.232.312,00	Kota Pekanbaru, Sail, Sukamaju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Sipil Negara		360.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Laporan	40.887.500,00	Kota Pekanbaru, Sail, Sukamaju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Sipil Negara		35.892.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	396.138.464,00	Kota Pekanbaru, Sail, Sukamaju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Sipil Negara		1.231.863.845,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	-			8 Jenis	437.510.000,00			-	-	Aparatur Sipil Negara	-	504.710.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				6 Unit	218.830.000,00	Kota Pekanbaru, Sail, Sukamaju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Sipil Negara		218.830.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	43.680.000,00	Kota Pekanbaru, Sail, Sukamaju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Sipil Negara		85.880.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	175.000.000,00	Kota Pekanbaru, Sail, Sukamaju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Sipil Negara		200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila	-			85,00 Persen	2.400.000.000,00						-	6.256.447.396,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatkan kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan]	Persentase Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila	95.00	75.00	75.00	75.00	2.400.000.000,00	-	-	-	-	-	-	6.256.447.396,00	-
	8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Pemantapan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-			100 Persen	2.400.000.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	TRANSFORMASI SOSIAL	ASN, Instansi Terkait Provinsi dan Kab/Kota, Siswa/Siswi SLTA	-	6.256.447.396,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				150 Orang	500.000.000,00	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	TRANSFORMASI SOSIAL	ASN, Instansi Terkait Provinsi dan Kab/Kota, Siswa/Siswi SLTA		2.175.587.239,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0009	Pelaksanaan tugas Paskibraka														
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka				1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	TRANSFORMASI SOSIAL	ASN, Instansi Terkait Provinsi dan Kab/Kota, Siswa/Siswi SLTA		1.080.860.157,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0012	Pembentukan Paskibraka														
			Jumlah Paskibraka				36 Orang	1.850.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	TRANSFORMASI SOSIAL	ASN, Instansi Terkait Provinsi dan Kab/Kota, Siswa/Siswi SLTA		3.000.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Politik	-			3,34 Poin	16.338.304.905,00						-	15.169.818.286,00	
		[Meningkatkan etika dan budaya politik]	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Politik Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	100 3.46	100 3.31	100 3.31	100 3.34	16.338.304.905,00	-	-	-	-	-	-	15.169.818.286,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	<i>Persentase Pemantapan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi dan Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</i>	-			100 Persen	16.338.304.905,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	TRANSFORMASI SOSIAL	Partai Politik, Mahasiswa, Masyarakat (Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Wanita, dan Tokoh Pemuda)	-	15.169.818.286,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i>				150 Orang	16.292.604.905,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	TRANSFORMASI SOSIAL	Partai Politik, Mahasiswa, Masyarakat (Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Wanita, dan Tokoh Pemuda)		14.797.839.536,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i>				50 Orang	2.300.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	TRANSFORMASI SOSIAL	Partai Politik, Mahasiswa, Masyarakat (Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Wanita, dan Tokoh Pemuda)		184.431.250,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i>				1 Laporan	43.400.000,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	TRANSFORMASI SOSIAL	Partai Politik, Mahasiswa, Masyarakat (Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Wanita, dan Tokoh Pemuda)		187.547.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	<i>Persentase Ormas Yang Berfungsi Sesuai Regulasi</i>	-			76,00 Persen	25.550.000,00						-	212.412.000,00	
		[Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan]	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	95.00	75.00	75.00	75.00	25.550.000,00	-	-	-	-	-	-	212.412.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	<i>Persentase Pemantapan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</i>	-			100 Persen	25.550.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL	Ormas,, LSM dan Instansi Terkait	-	212.412.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</i>				146 Orang	25.550.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL	Ormas,, LSM dan Instansi Terkait		212.412.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	<i>Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya</i>	-			3,20 Poin 3,25 Poin	1.374.435.556,00						-	2.113.117.500,00	
		[Meningkatkan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat]	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya	3.32 3.37	2.94 3.13	3.13 3.25	3.20 3.25	1.374.435.556,00	-	-	-	-	-	-	2.113.117.500,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	<i>Persentase Pemantapan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</i>	-			100 Persen	1.374.435.556,00			Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFORMASI SOSIAL	Ormas, FKUB, Tokoh Masyarakat, Instansi Terkait, Mahasiswa dan Pelajar	-	2.113.117.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</i>				90 Orang	1.275.415.556,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFORMASI SOSIAL	Ormas, FKUB, Tokoh Masyarakat, Instansi Terkait, Mahasiswa dan Pelajar		2.000.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</i>				1 Laporan	99.020.000,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFORMASI SOSIAL	Ormas, FKUB, Tokoh Masyarakat, Instansi Terkait, Mahasiswa dan Pelajar			113.117.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6.	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	<i>Persentase Timdu PKS Kab/Kota Yang Melaksanakan RAD Secara Efektif</i>	-			75,00 Persen	1.335.000.065,00						-	3.451.684.066,00		
		[Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan]	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	95.00	75.00	75.00	75.00	1.335.000.065,00	-	-	-	-	-	-	3.451.684.066,00	-	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	<i>Persentase Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</i>	-			100 Persen	1.335.000.065,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI SOSIAL	Forkopimda Provinsi, Instansi Terkait, FKDM, FKPT, Masyarakat dan Orang Asing	-	3.451.684.066,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.1.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun</i>				1 Dokumen	153.650,00	Kota Pekanbaru, Sail, Sukamaju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI SOSIAL	Forkopimda Provinsi, Instansi Terkait, FKDM, FKPT, Masyarakat dan Orang Asing		5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.1.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
			<i>Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun</i>				1 Dokumen	153.650,00	Kota Pekanbaru, Sail, Sukamaju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI SOSIAL	Forkopimda Provinsi, Instansi Terkait, FKDM, FKPT, Masyarakat dan Orang Asing		5.070.646,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</i>				50 Orang	331.320.000,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	TRANSFORMASI SOSIAL	Forkopimda Provinsi, Instansi Terkait, FKDM, FKPT, Masyarakat dan Orang Asing		874.690.472,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</i>				80 Orang	33.970.265,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	TRANSFORMASI SOSIAL	Forkopimda Provinsi, Instansi Terkait, FKDM, FKPT, Masyarakat dan Orang Asing		420.242.650,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</i>				6 Laporan	231.752.500,00	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	TRANSFORMASI SOSIAL	Forkopimda Provinsi, Instansi Terkait, FKDM, FKPT, Masyarakat dan Orang Asing		280.938.229,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.06.1.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi															
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi</i>				1 Dokumen	737.650.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	TRANSFORMASI SOSIAL	Forkopimda Provinsi, Instansi Terkait, FKDM, FKPT, Masyarakat dan Orang Asing		1.865.742.069,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
J U M L A H									36.054.585.212,00							43.542.067.896,00	

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau Tahun 2026 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Penyusunan Rencana kerja tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau Tahun 2025-2026 dan RPD Provinsi Riau Tahun 2025-2026 dapat terwujud.

Rencana Kerja (Renja) sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya hingga kebawah dan keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

A. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau ini selain menjadi panduan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2026, Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk menetapkan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau. Untuk memperoleh pencapaian hasil yang optimal pada pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau, baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing SKPD serta pembagian urusan antara pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Kaidah - Kaidah Pelaksanaan

1. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau tahun 2026 dalam rangka mensinkronisasikan dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang bersumber dari APBD;
2. Di dalam penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau tahun 2026 masih belum sempurna, terkait dengan terbitnya Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dimana pemahaman tentang aturan tata cara penyusunan masih berbeda-beda.

C. Rencana Tindak Lanjut

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Renja Tahun 2026, maka dilakukan langkah – langkah sebagai berikut :

1. Mensosialisasikan Renja ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi;
2. Pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dirumuskan tidak menyimpang dari Renja;

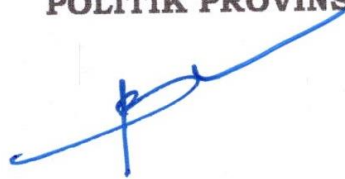
3. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam Renja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan Renja yang telah dibuat.

Rencana Kerja (Renja) diharapkan dapat mengakomodir pada program prioritas yang mendukung indikator kinerja utama Kepala Daerah sehingga perlu kebutuhan pagu yang mencukupi dalam rangka pencapaian target kinerja.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau Tahun 2026, disusun sebagai pedoman bagi pelaksana dalam menjalankan kewajibannya dan merupakan dasar dalam menangani dan menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau dalam rangka mewujudkan visi dan misi dengan memperhatikan kondisi wilayah Riau dan dinamika kehidupan sosial politik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Pekanbaru, 28 Oktober 2025

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK PROVINSI RIAU**



BOBY RACHMAT, S.STP., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP.19830516 200112 1 002



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Thamrin Nomor 93, Sail, Pekanbaru, Riau 28132,
Laman kesbangpol.riau.go.id, Pos-el kesbangpol@riau.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI RIAU**

Nomor. Kpts. **16** /BKBP/2025

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI RIAU TAHUN 2026
DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI
RIAU TAHUN 2025**

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI RIAU**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah menyusun Renja Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah, RPD dan RKPD
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 125 sampai dengan Pasal 135 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam rangka penyusunan Renja Perangkat Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah bagi daerah dengan periode rencana pembangunan jangka menengah daerah berakhir pada tahun 2024;
12. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor Tahun 14 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 14);
13. Peraturan Gubernur Riau Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Riau Tahun 2025 - 2026 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 3);
14. Peraturan Gubernur Riau Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2025 – 2026 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor : 4).
15. Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. 2026 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 Nomor 53)

16. Surat dari Sekretariat Daerah Provinsi Riau Nomor 0007.7.2.4/Bappeda/250 Tanggal 21 Januari 2025 Perihal Undangan Kick Off Meeting Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2026.
17. Surat dari Sekretariat Daerah Provinsi Riau Nomor 0007.7.2.4/Bappeda/433 tanggal 05 Pebruari 2025 hal Penginputan Rancangan Awal Renja Tahun 2026 dan Target Kinerja urusan Prioritas Tahun 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU :** Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau Tahun 2025 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. melakukan Pengumpulan, pengolahan data dan informasi serta melakukan evaluasi rencana kerja tahun sebelumnya;
 - b. melakukan koordinasi dan penelaahan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Dokumen Kebijakan Lainnya.
 - c. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Pusat dan instansi terkait lainnya;
 - d. menyusun agenda kerja penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau Tahun 2025;
 - e. melakukan analisis dan pengkajian hasil evaluasi rencana kerja tahun sebelumnya, untuk penentuan isu-isu strategis, arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah;
 - f. Perumasan program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai target kinerja dan pendanaan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah, dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RPD;
 - g. terlibat secara penuh dalam pembahasan dan penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau Tahun 2025.
 - h. Merencanakan pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau Tahun 2025.
 - i. Melaksanakan Koordinasi dengan instansi terkait, dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau Tahun 2025.
 - j. Mempersiapkan segala administrasi yang berhubungan dengan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau Tahun 2025.
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau.
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 10 Februari 2025

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI RIAU

JENRI SALMON GINTING, AP, M.Si

Pembina Utama Muda / IV.c

NIP. 19750101 199402 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Riau selaku Ketua TAPD Provinsi Riau
2. Kepala Bappeda Provinsi Riau, di Pekanbaru;
3. Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja (renja) Tahun 2025, Badan Kesbangpol Provinsi Riau.

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau.
 Nomor : Kpts. 16/BKBP/2025
 Tanggal : 10 Pebruari 2025

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI RIAU TAHUN 2026
 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 PROVINSI RIAU TAHUN 2025**

No.	Kedudukan dalam Tim	Unit Kerja	Jabatan Struktural/Fungsional
1	Ketua	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2	Sekretaris	Sekretariat	Sekretaris
3	Wakil Sekretaris	Subbag Kepegawaian dan Umum	Kasubbag Kepegawaian dan Umum
4	Sekretariat		
	- Koordinator	Sekretariat	Perencana Ahli Pertama
	- Anggota 1	Sekretariat	Penela'ah Teknis Kebijakan
	- Anggota 2	Sekretariat	Tenaga Harian Lepas (THL)
5	Kelompok Kerja Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa		
	- Koordinator	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
	- Anggota	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	Analisis Kebijakan Ahli Muda
6	Kelompok Kerja Bidang Politik Dalam Negeri		
	- Koordinator	Bidang Politik Dalam Negeri	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri
	- Anggota	Bidang Politik Dalam Negeri	Analisis Kebijakan Ahli Muda
7	Kelompok Kerja Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan		
	- Koordinator	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan
	- Anggota	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan	Analisis Kebijakan Ahli Muda
8	Kelompok Kerja Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik		
	- Koordinator	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
	- Anggota	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Analisis Kebijakan Ahli Muda

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 PROVINSI RIAU



JENRI SALMON GINTING, AP, M.Si
 Pembina Utama Muda / IV.c
 NIP. 19750101 199402 1 002



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
INSPEKTORAT DAERAH

JL. CUT NYAK DIEN TELP. (0761) 22300 FAX (0761) 23256

PEKANBARU

LAPORAN HASIL REVIU
RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI RIAU
TAHUN 2026



NOMOR : 429/LHR/INSP-RIAU/Tr.IV/XII/2025

TANGGAL : 02 DESEMBER 2025



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

INSPEKTORAT DAERAH

JL. CUT NYAK DIEN TELP. (0761) 22300 FAX. (0761) 23256
Email : inspektorat@riau.go.id website : inspektorat.riau.go.id
PEKANBARU

Nomor : 423/LHR/INSP-RIAU/lr.IV/XII/2025 Pekanbaru, Desember 2025
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Laporan Hasil Reviu atas Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau Tahun 2026

Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau
di - Pekanbaru

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan, kami telah melakukan reviu terhadap Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau Tahun 2026, dengan uraian sebagai berikut:

I. Ringkasan Eksekutif

Inspektorat Daerah Provinsi Riau sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah telah melakukan reviu atas Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau Tahun 2026 berupa pengujian terbatas terhadap substansi dan penyajian dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2026.



Reviu ditujukan untuk membantu terlaksananya penyusunan dan penyajian dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) serta memberikan keyakinan terbatas mengenai kepatuhan dan keabsahan informasi yang disajikan telah sesuai dengan kaidah-kaidah perencanaan, sehingga dapat menghasilkan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas.

Dalam pelaksanaan reviu, kami telah melakukan serangkaian aktivitas untuk menguji substansi dan proses penyusunan atas penyajian dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2026 dengan dokumen pendukung lainnya, permintaan keterangan mengenai proses penyusunan untuk mengetahui hubungan dan hal-hal yang tidak terdapat dalam dokumen penyajian.

Berdasarkan hasil reviu yang dilakukan, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyusunan dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau Tahun 2026 **belum sepenuhnya** didukung dengan dokumen pendukung yang memadai.
2. Penyajian sistematika penulisan dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau Tahun 2026 **telah sepenuhnya** memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Surat Plt. Kepala Bappeda Provinsi Riau Nomor 000.7/136/BAPPEDA-BIDANG I/2025 tanggal 29 Oktober 2025.
3. Rumusan tujuan dan sasaran dalam dokumen Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau Tahun 2026 pada BAB III **belum sepenuhnya** selaras dengan rumusan tujuan dan sasaran pada BAB IV Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2026, dimana **masih terdapat** rumusan sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah pada RKPD Tahun 2026 yang **belum disajikan** dalam dokumen Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau Tahun 2026.

4. Penetapan tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau Tahun 2026 **telah selaras** dan didasari atas isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau.
5. Penetapan indikator kinerja kegiatan dan sub kegiatan dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau Tahun 2026 **belum selaras** dan mendukung indikator kinerja program dalam Renstra-PD dan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau Tahun 2026.
6. Penyajian rumusan indikator program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau Tahun 2026 **belum selaras** dengan Renstra-PD dan RKPD Tahun 2026.
7. Penyajian rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau Tahun 2026 **telah selaras** dengan Renstra-PD dan RKPD Tahun 2026.
8. Penyajian pagu program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau Tahun 2026 **telah diselaraskan** dengan pagu RKPD Tahun 2026.
9. Penyajian indikator target program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau Tahun 2026 **belum sepenuhnya** memedomani indikator target pada Renstra-PD.

II. Dasar Hukum

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 3743/XII/2024, tanggal 11 Desember 2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025;
8. Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Provinsi Riau Nomor 370/SPT/2025 tanggal 03 November 2025.

III. Tujuan Reviu

Reviu atas Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau ini bertujuan untuk:

1. Memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau Tahun 2026 telah disusun berdasarkan kaidah peraturan perundang-undangan.
2. Memberikan saran perbaikan atas kelemahan dalam penyusunan dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau Tahun 2026.

IV. Ruang Lingkup Reviu

Ruang lingkup Reviu atas Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau Tahun 2026 dilaksanakan dengan melakukan pengujian sekurang-kurangnya atas:

1. Kelengkapan dokumen pendukung penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD);
2. Kesesuaian sistematika penulisan dan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD);
3. Kesesuaian Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dengan RKPD;
4. Penyusunan substansi antar Bab Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) meliputi :
 - a. Tujuan, sasaran, program dan kegiatan pada Bab III Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) didasarkan pada isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah pada Bab II Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD);
 - b. Indikator kinerja kegiatan dan sub kegiatan mendukung indikator kinerja program dalam Renstra-PD dan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD);
 - c. Keselarasan indikator program, kegiatan dan sub kegiatan antara Renstra-PD, RKPD dan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD);
 - d. Keselarasan rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan yang terdapat dalam Renstra-PD, RKPD dan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD);
 - e. Keselarasan pagu Renstra-PD, RKPD dengan pagu Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD); dan
 - f. Keselarasan indikator target program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renstra-PD dengan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

V. Metodologi Reviu

Metodologi yang digunakan dalam Reviu atas Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau Tahun 2026 adalah melalui tahapan persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Penelaahan dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).
2. Wawancara dan diskusi dengan pihak-pihak terkait dalam bentuk tatap muka maupun menggunakan media komunikasi.
3. Pengujian terbatas terhadap kesesuaian, konsistensi, dan integrasi perencanaan pembangunan, dengan tujuan memberikan keyakinan terbatas atas akurasi, keandalan, dan keabsahan dokumen.
4. Konfirmasi dan tanggapan dengan pihak terkait sebelum finalisasi Laporan Hasil Reviu (LHR) atas Catatan Hasil Reviu (CHR).

VI. Gambaran Umum

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau sebagai Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Penunjang Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.

Adapun hal yang mendasari perlu dilakukannya penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau Tahun 2026, yaitu:

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau dan memastikan pencapaian target tahunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2026; dan
2. Sebagai instrumen akuntabilitas kinerja di tahun 2026 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan laporan kinerja.

VII. Uraian Hasil Reviu

Berdasarkan hasil reviu yang telah dilakukan atas dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau Tahun 2026 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kelengkapan dokumen pendukung penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan bahwa penyusunan dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau Tahun 2026 **belum sepenuhnya** didukung dengan dokumen pendukung yang memadai sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR 01.

2. Kesesuaian sistematika penulisan dan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan bahwa penyajian sistematika penulisan dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau Tahun 2026 **telah sepenuhnya** memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Surat Plt. Kepala Bappeda Provinsi Riau Nomor 000.7/136/BAPPEDA-BIDANG I/2025 tanggal 29 Oktober 2025 sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR 02.

3. Kesesuaian Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dengan RKPD

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan bahwa rumusan tujuan dan sasaran dalam dokumen Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau Tahun 2026 pada BAB III **belum sepenuhnya** selaras dengan rumusan tujuan dan sasaran pada BAB IV Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2026, dimana **masih terdapat** rumusan sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah pada RKPD Tahun 2026 yang **belum disajikan** dalam dokumen Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau Tahun 2026 sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR 03.

4. **Penyusunan subtansi antar Bab Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) meliputi :**

a. **Tujuan, sasaran, program dan kegiatan pada Bab III Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) didasarkan pada isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah pada Bab II Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)**

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan bahwa penetapan tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau Tahun 2026 **telah selaras** dan didasari atas isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR 04.a.

b. **Indikator kinerja kegiatan dan sub kegiatan mendukung indikator kinerja program dalam Renstra-PD dan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)**

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan bahwa penetapan indikator kinerja kegiatan dan sub kegiatan dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau Tahun 2026 **belum selaras** dan mendukung indikator kinerja program dalam Renstra-PD dan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau Tahun 2026 sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR 04.b.

c. **Keselarasan indikator program, kegiatan dan sub kegiatan antara Renstra-PD, RKPD dan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)**

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan bahwa penyajian rumusan indikator program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rancangan Akhir Rencana

Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau Tahun 2026 **belum selaras** dengan Renstra-PD dan RKPD Tahun 2026 sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR 04.c.

d. Keselarasan rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan yang terdapat dalam Renstra-PD, RKPD dan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan bahwa penyajian rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau Tahun 2026 **telah selaras** dengan Renstra-PD dan RKPD Tahun 2026 sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR 04.d.

e. Keselarasan pagu Renstra-PD, RKPD dengan pagu Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan bahwa penyajian pagu program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau Tahun 2026 **telah diselaraskan** dengan pagu RKPD Tahun 2026 sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR 04.e.

f. Keselarasan indikator target program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renstra-PD dengan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan bahwa penyajian indikator target program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau Tahun 2026 **belum sepenuhnya** memedomani indikator target pada Renstra-PD sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR 04.f.

Uraian lebih kongkrit terkait pada poin 1 (satu) sampai dengan poin 4 (empat) di atas dapat dilihat dalam Kertas Kerja Reviu (KKR) Rancangan Akhir Rencana Kerja

Perangkat Daerah (Renja-PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau Tahun 2026 sebagaimana terlampir.

VIII. Saran

Berdasarkan hasil reviu atas Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau Tahun 2026, kami memberikan saran kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau melalui Tim Penyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau Tahun 2026 agar:

1. Melakukan koordinasi dengan Bappeda Provinsi Riau untuk mendapatkan dokumen pendukung dalam melaksanakan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau Tahun 2026;
2. Melakukan penyesuaian/penyempurnaan penyajian pada Bab II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau Tahun 2026 dengan menggunakan data hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2024 dari Bappeda Provinsi Riau;
3. Melakukan penyesuaian/penyempurnaan penyajian pada rumusan tujuan dan sasaran dan rumusan indikator kinerja tujuan dan sasaran pada Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2026;
4. Melakukan penyesuaian/penyempurnaan penyajian pada rumusan Indikator Program, Kegiatan, dan Subkegiatan pada Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau Tahun 2025-2029;
5. Memperhatikan penyajian indikator target program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renstra-PD.

IX. Apresiasi

Inspektorat Daerah Provinsi Riau mengucapkan terima kasih atas bantuan dan kerjasama dari semua pihak, terutama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau sehingga kami dapat menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan reviu dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau Tahun 2026.

Demikian Laporan Hasil Reviu atas Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau Tahun 2026 disampaikan untuk mendapatkan perhatian dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pit. INSPEKTUR DAERAH PROVINSI RIAU,



Ir. AGUS RIANTO, MT
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19680809 199303 1 004

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Riau
2. Kepala BAPPEDA Provinsi Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

INSPEKTORAT DAERAH

JL. CUT NYAK DIEN TELP. (0761) 22300 FAX (0761) 23256

PEKANBARU

CATATAN HASIL REVIU

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI RIAU
TAHUN 2026**



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
INSPEKTORAT DAERAH

JL. CUT NYAK DIEN TELP. (0761) 22300 FAX. (0761) 23256
email : inspektorat@riau.go.id website : inspektora.t.riau.go.id
PEKANBARU

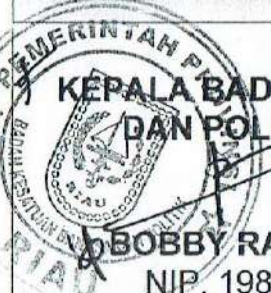

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI RIAU	Disusun oleh	Mohd. Fauzan Anugrah, SSTP., M.Si,
	Tanggal	19 November 2025
	Direviu oleh	Aulia Osna R, SH, MH
	Tanggal	20 November 2025
	Disetujui oleh	Roni Cokro S, SE, M.Si
	Tanggal	24 November 2025

CATATAN HASIL REVIU

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-PD)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI RIAU TAHUN 2026**

Uraian Catatan Hasil Reviu	No Indeks KKR
A. Pengujian Atas Kelengkapan Dokumen Pendukung Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)	KKR 01
Penyusunan dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau Tahun 2026 belum sepenuhnya didukung dengan dokumen pendukung yang memadai.	
B. Pengujian atas Kesesuaian Sistematika Penulisan dan Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)	KKR 02
Penyajian sistematika penulisan dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau Tahun 2026 telah sepenuhnya mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Surat Plt. Kepala Bappeda Provinsi Riau Nomor 000.7/136/BAPPEDA-BIDANG I/2025 tanggal 29 Oktober 2025.	
C. Pengujian Atas Kesesuaian Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dengan RKPD	KKR 03
Rumusan tujuan dan sasaran dalam dokumen Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau Tahun 2026 pada Bab III belum sepenuhnya selaras dengan rumusan tujuan dan sasaran pada Bab IV Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, dimana masih terdapat rumusan sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah pada RKPD Tahun 2026 yang belum disajikan dalam dokumen Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau Tahun 2026.	

D. Pengujian Atas Penyusunan Subtansi Antar Bab Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) meliputi :	
1. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan pada BAB III Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Didasarkan pada Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah pada BAB II Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)	KKR 04.a
Penetapan tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau Tahun 2026 telah selaras dan didasari atas isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau.	
2. Indikator Kinerja Kegiatan dan Subkegiatan Mendukung Indikator Kinerja Program dalam Renstra-PD dan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)	KKR 04.b
Penetapan indikator kinerja kegiatan dan subkegiatan dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau Tahun 2026 belum selaras dan mendukung indikator kinerja program dalam Renstra-PD dan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau Tahun 2026.	
3. Keselarasan Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan antara Renstra-PD, RKPD dan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)	KKR 04.c
Penyajian rumusan indikator program, kegiatan dan Subkegiatan dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau Tahun 2026 belum selaras dengan Renstra-PD.	
4. Keselarasan Rumusan Program, Kegiatan dan Subkegiatan yang terdapat dalam Renstra-PD, RKPD dan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)	KKR 04.d
Penyajian rumusan program, kegiatan dan Subkegiatan dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau Tahun 2026 telah selaras dengan Renstra-PD dan RKPD Tahun 2026.	
5. Keselarasan Pagu Renstra-PD, RKPD 2026 dengan Pagu Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)	KKR 04.e
Penyajian pagu program, kegiatan dan Subkegiatan dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau Tahun 2026 telah diselaraskan dengan pagu RKPD Tahun 2026.	

<p>6. Keselarasan Indikator Target Program, Kegiatan dan Subkegiatan pada Renstra-PD dengan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)</p>	<p>KKR 04.f</p>
<p>Penyajian indikator target program, kegiatan dan Subkegiatan dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau Tahun 2026 belum sepenuhnya memedomani indikator target pada Renstra-PD.</p>	
<p>HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN</p>	
<p>SARAN</p>	
<p>Berdasarkan hasil reviu Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau Tahun 2026, kami memberikan saran kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau melalui Tim Penyusun Rancangan Akhir Renja-PD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau Tahun 2026 agar :</p>	
<p>1. Melakukan koordinasi dengan Bappeda Provinsi Riau untuk mendapatkan dokumen pendukung dalam melaksanakan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau Tahun 2026.</p>	
<p>2. Melakukan penyesuaian/penyempurnaan penyajian pada Bab II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau Tahun 2026 dengan menggunakan data hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2024 dari Bappeda Provinsi Riau.</p>	
<p>3. Melakukan penyesuaian/penyempurnaan penyajian pada rumusan tujuan dan sasaran dan rumusan indikator kinerja tujuan dan sasaran pada Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau Tahun 2026 sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2026.</p>	
<p>4. Melakukan penyesuaian/penyempurnaan penyajian pada rumusan Indikator Program, Kegiatan, dan Subkegiatan pada Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau Tahun 2026 sesuai dengan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau Tahun 2025-2029.</p>	
<p>5. Memperhatikan Penyajian indikator target Program, Kegiatan dan Subkegiatan pada Rensra-PD.</p>	
<p> KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI RIAU, BOBBY RACHMAT, S.STP., M.Si NIP. 19830516 200112 1 002</p>	<p>Pekanbaru, November 2025 PENGENDALI MUTU,  Drs. ARMANSYAH NIP. 19631231 198303 1 309</p>

**VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR RENJA KESBANGPOL PROVINSI RIAU
TAHUN 2026**

NO	BAB/SUBBAB	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI		
			SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1.	BAB I	PENDAHULUAN			
	1.1. Latar Belakang	Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD	√		
	1.2 Dasar Hukum	Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.		√	<ul style="list-style-type: none"> • Dimasukkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
	1.3 Maksud dan Tujuan	Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.	√		
	1.4 Sistematika Penulisan	Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.	√		
2.	BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024			
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	Berisikan uraian mengenai : <ol style="list-style-type: none"> 1. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 2. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 3. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 		√	<ul style="list-style-type: none"> - Perlu disampaikan informasi uraian tentang point 1 sd 6 disamping setelah tabel 2.1

NO	BAB/SUBBAB	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI		
			SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
		4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan; 5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; 6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut; dan 7. Sajikan Tabel T-C.29			
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	1. Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK; 2. Sajikan Tabel T-C.30	√		
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Berisikan uraian mengenai : 1. Tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD; 2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD; 3. Dampaknya terhadap pencapaian tujuan dan sasaran daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (<i>Sustainable Development Goals</i>); 4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD; dan 5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas tahun yang direncanakan	√		
	2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	Berisikan uraian mengenai : 1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; 2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;		√	Perlu penjelasan terkait proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan

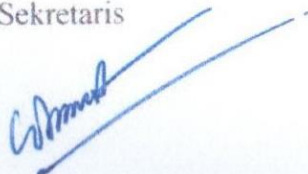
NO	BAB/SUBBAB	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI		
			SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
		3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat didalam RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda; dan 4. Sajikan Tabel T-C.31			
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Masyarakat	Berisikan uraian mengenai : 1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan/sub kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh; 2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah; 3. Sajikan Tabel T-C.32		√	- Kesesuaian usulan dengan tugas pokok/fungsi OPD → Perlu diperjelas/ditambahkan analisis. Dokumen tidak secara eksplisit menuliskan analisis kesesuaian atau keterkaitan dengan isu strategis yang sedang dihadapi OPD, misalnya: mengapa hibah ke FPK penting untuk mendukung Pancasila, atau bagaimana bantuan ke FKUB menangani isu sosial-keagamaan Perlu dicek, apakah Tabel 2.5 sesuai dengan Tabel T-C.32
3	BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH			
	3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	Berisikan uraian mengenai : Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	√		
	3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah	Berisikan uraian mengenai : 1. Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah; 2. Target Indikator tujuan dan sasaran Perangkat Daerah pada Renja berdasarkan Renstra Perangkat Daerah.		√	
	3.3 Program, Kegiatan	Berisikan uraian mengenai :	√		- Perlu dicek, apakah Tabel 3.3 sesuai dengan Tabel T-C.33

NO	BAB/SUBBAB	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI		
			SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
	dan Sub Kegiatan	1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan; 2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan; 3. Penjelasan jika rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan tidak sesuai dengan RKPD, baik jenis program, kegiatan dan sub kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya dan 4. Sajikan Tabel T-C.33			- Penjelasan jika rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan tidak sesuai dengan RKPD, baik jenis program, kegiatan dan sub kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya (jika ada).
4	BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH			
		Berisikan uraian mengenai : Hasil inputan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan pada SIPD RI sesuaikan target indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan dengan RKPD	√		Agar dicek Tabel 4.1 kesesuaiannya
5	BAB V	PENUTUP			
		Berisikan uraian mengenai : 1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; 2. Kaidah-kaidah pelaksanaan; 3. Rencana tindak lanjut; 4. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen(tanggal terbit Pergub Renja), nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah , serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.		√	Disesuaikan tanggal 28 Oktober 2025
6	LAMPIRAN	1. SK Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 2. Lampirkan di halaman depan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2026		√	<ul style="list-style-type: none"> • Belum dilampirkan • Belum dilampirkan • Belum dilampirkan • Untuk dilampirkan

NO	BAB/SUBBAB	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI		
			SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
		3. BA Hasil Review Inspektorat 4. Hasil Verifikasi 2026			

Pekanbaru, 21 November 2025

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau
Sekretaris



SRI PETRI HARYANTI, S.Pd
NIP. 19690321 199802 2 001

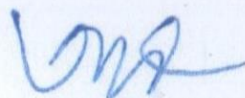
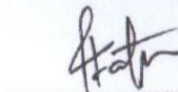
Mengetahui,
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Bappeda Provinsi Riau



RAJA JUARISMAN, ST., M.Si
NIP. 19770611 200012 1 002

Penyusun :

- NAMA : Mursalim, S.T
NIP. : 19791008 200902 1 003
- NAMA : Fatmawati, SH
NIP. : 19830201 201001 2 029
- NAMA : Saryono
NIP. : 19890223 202521 1 005


Verifikator :

- NAMA : Rudi Hendra Gunawan, S.Kom., M.Si
NIP. : 19701224 199803 1 004
- NAMA : Ari Dianuari, ST
NIP. : 19810103 200902 1 002
- NAMA : Tiara Kusuma Dewi
NIP. : 19861020 201001 2 014

